



RENSTRA

Rencana

Strategis

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN
2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunianya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 telah selesai tersusun dengan apa yang diharapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan rancangan akhir rencana strategis ini diharapkan dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Serta formulasi pencapaian visi dan misi dinas yang sehaluan dengan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.

Melalui penyusunan RENSTRA ini dapat menjabarkan komitmen Dinas Perhubungan Kalimantan Barat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders. Mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat ini dapat menjadi pedoman Data dan Informasi untuk pelayanan publik dan keperluan perencanaan dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Perhubungan di masa mendatang.

Sungai Raya, Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Barat,

Y. ANTONIUS RAWING, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 199403 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	23
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	68
4.2 Cascading	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	75
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	76
6.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	102
7.1 IKU dan IKK Tahun 2024-2026	102
BAB VIII PENUTUP	104

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022	10
Tabel 2.2 Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	10
Tabel 2.3 Jumlah kebutuhan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.....	11
Tabel 2.4 Perlengkapan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.....	12
Tabel 2.5 Capaian IKU Tahun 2022	14
Tabel 2.6 Capaian Kinerja tahun 2021 - 2022	15
Tabel 2.7 Korelasi Capaian Kinerja Terhadap Program kegiatan.....	15
Tabel 3.1 Korelasi Sasaran Strategis Kementerian dengan Dinas Perhubungan Prov. Kalbar.....	24
Tabel 3.3 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat.....	27
Tabel 3.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017.....	31
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	32
Tabel 3.6 Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan agama	32
Tabel 3.7 Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat	33
Tabel 3.8 Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan.....	35
Tabel 3.9 Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kab/Kota dan Jenis Kendaraan di Kalbar tahun 2019-2021	36
Tabel 3.10 Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kab/Kota dan Jenis Kendaraan di Kalbar tahun 2019-2021.....	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan.....	68
Tabel 4.2 Cascading.....	70
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	75

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....33

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026.....102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat9

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Rencana Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kegiatan multidimensional yang dilaksanakan secara terpadu, selaras serasi dan seimbang, di samping sebagian integral dari pembangunan nasional maka dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, potensi serta aspirasi masyarakat. Selain itu juga diarahkan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan pemerintah dalam periode 2024-2026.

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2024-2026 yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Strategis adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran indikator, kebijakan dan program pemerintah.

Penerapan otonomi daerah diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut diperlukan visi bersama yang mengarah kepada tindakan yang penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk di dalamnya masyarakat yang diharapkan dapat lebih berperan sebagai subyek dan pelaksana pembangunan.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga/dinas penunjang penggerak pembangunan daerah mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang perhubungan, melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan pada sektor perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok daerah dan antar negara. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat di pandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis tahun 2019 - 2023 sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Strategis ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebagai kesinambungan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Rencana strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- h. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;](#)
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

- Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005- 2025;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - m. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
 - n. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang berlandaskan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Memberikan arah dan pedoman dalam menjabarkan program dan kegiatan juga menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dalam Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Barat. Atas dasar itu maka Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi di provinsi Kalimantan Barat.
- b. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program prioritas pembangunan perhubungan di Kalimantan Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Mewujudkan komitmen terhadap kesepakatan program yang telah dibahas secara partisipasi di antara para bidang atau stakeholders khususnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Memperkuat landasan penentuan program-program tahunan daerah yang sistematis, kronologis dan berkelanjutan secara sinergis.
- e. Dokumen Renstra Sebagai tolok ukur atau parameter dalam menentukan keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam dokumen LAKIP.
- f. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

LAMPIRAN

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 5-71/2021 Penjelasan atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah : 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah di daerah dalam bidang Perhubungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan tugas pokoknya, adalah :**“Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran dan pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan”**. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi.
- b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi; sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

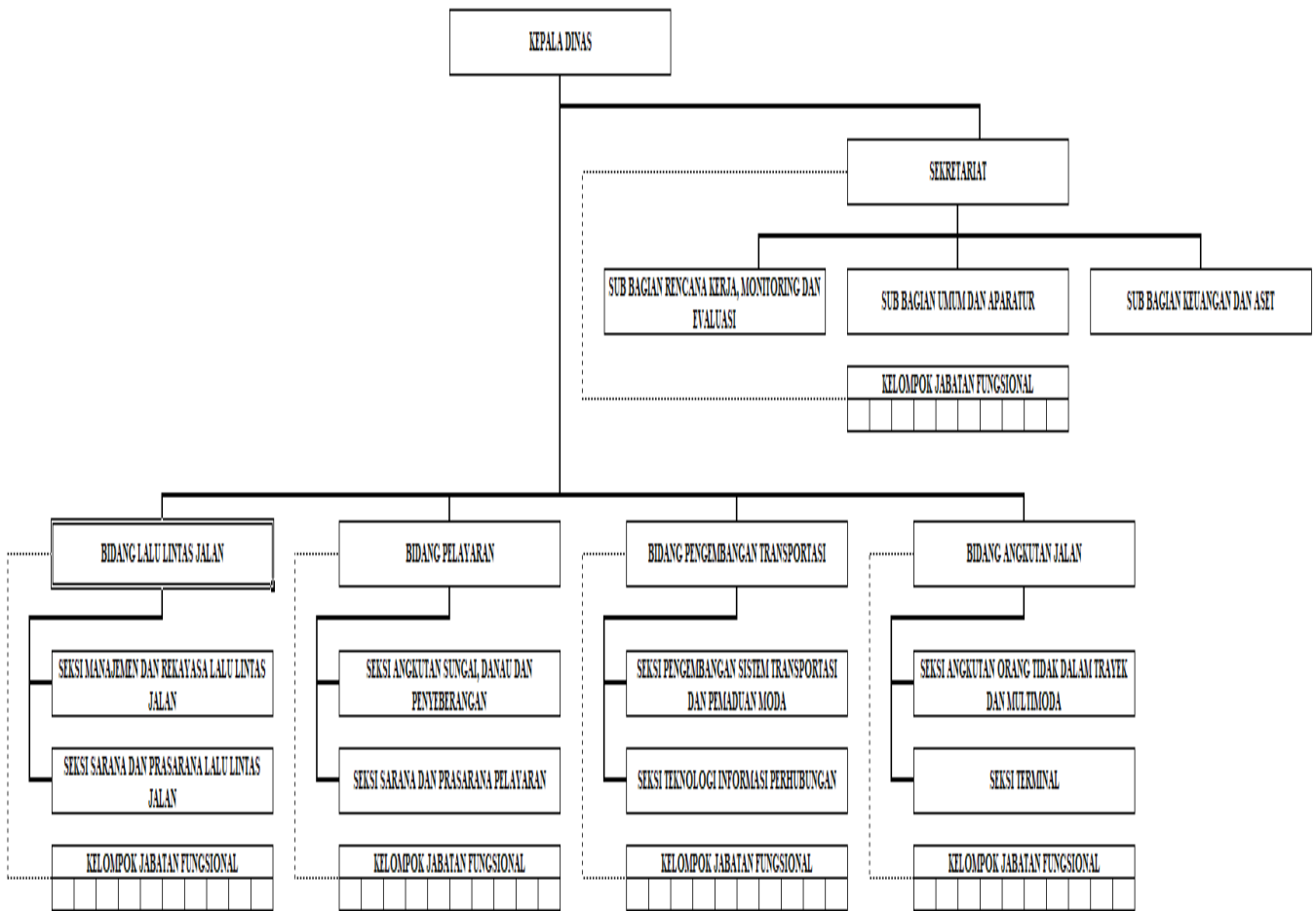
Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas dibidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan prasarana lalu lintas serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Lalu Lintas Jalan.
- d. Bidang Pelayaran mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, sarana dan prasarana pelayaran serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pelayaran.
- e. Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem transportasi, pemaduan moda transportasi, dampak lingkungan perhubungan, teknologi dan informasi perhubungan, serta bertanggungjawab memimpin

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan transportasi.

- f. Bidang Angkutan Jalan Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Angkutan Dalam Trayek, Angkutan Tidak Dalam Trayek dan multi moda, pengelolaan Terminal serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Angkutan Jalan.

Gambar 1.1
STRUKTUR
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 75 orang dengan rincian berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan serta kebutuhan dalam 5 tahun kedepan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	4 Orang
3.	Pembina	IV/a	6 Orang
4.	Penata Tingkat I	III/d	17 Orang
5.	Penata	III/c	4 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	16 Orang
7.	Penata Muda	III/a	3 Orang
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	14 Orang
9.	Pengatur	II/c	6 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3 Orang
11.	Juru	I/c	1 Orang
JUMLAH			75 Orang

Tabel 2.2

Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO	PANGKAT	JUMLAH	PRIA	WANITA
1.	Magister (S2)	10 Orang	10 Orang	-
2.	Sarjana (S1)	26 Orang	20 Orang	6 Orang
3.	Diploma III	11 Orang	9 Orang	2 Orang
4.	SMA	25 Orang	21 Orang	4 Orang
5.	SMP	2 Orang	2 Orang	-
6.	SD	1 Orang	1 orang	Orang
JUMLAH		75 Orang	63 Orang	12 Orang

Tabel 2.3

Jumlah Kebutuhan ASN Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN ASN					Ket
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	1	1	1	1	1	
2	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1	1	1	1	
3	Analisis Kepegawaian Keahlian Muda	1	1	1	1	1	
4	Arsiparis Keterampilan Penyelia	1	1	1	1	1	
5	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	2	2	2	2	2	
6	Arsiparis Pelaksana/Terampil	1	1	1	1	1	
7	Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan Pelaksana/Terampil	1	1	1	1	1	
8	Pengadministrasi Umum	0	0	1	1	1	
	Pengemudi	1	1	1	1	1	
9	Petugas Keamanan	7	7	7	7	7	
8	Pramu Kebersihan	7	7	7	7	7	
9	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	1	1	1	
10	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	1	1	1	1	1	
11	Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	2	2	2	2	
12	Pemeriksa Lalu Lintas	4	4	4	4	4	
13	Pengatur Lalu Lintas Jalan	11	11	15	15	15	
14	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	1	1	1	1	1	
15	Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan	1	1	1	1	1	
16	Analisis Kebijakan	1	1	1	1	1	
17	Kepala Bidang Angkutan Jalan	1	1	1	1	1	
18	Analisis Angkutan Darat	1	1	0	0	1	
19	Pengawas Terminal	8	9	10	10	11	
20	Pengatur Lalu Lintas	24	24	24	24	24	
21	Pengelola Keuangan	1	1	1	1	1	
22	Petugas Keamanan Terminal	12	12	12	12	12	
23	Analisis Kebijakan	1	1	1	1	1	
24	Kepala Bidang Pelayaran	1	1	1	1	1	

25	Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	1	1	1	
26	Pengawas Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau	2	2	2	2	2	
27	Pengelola Keuangan Bidang Pelayaran	0	0	0	1	1	
28	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran	1	1	1	1	1	
29	Pengelola Data Alur dan Perambuan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	1	1	1	1	
30	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	0	1	1	1	1	
31	Pelaksana Teknologi Informasi Perhubungan	1	1	1	1	1	

2.2.2 Asset

Perlengkapan dan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Perlengkapan Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran/ Jumlah	Satuan
1.	Tanah	213.904	M2
2.	Gedung TU	520	M2
3.	Gedung Bidang Darat	320	M2
4.	Gedung Bidang Laut	200	M2
5.	Gedung Bidang Pengembangan Transportasi	160	M2
6.	Gedung Angkutan Jalan/Postel	339	M2
7.	Gedung Olahraga fitness	320	M2
8.	Gedung Arsip	200	M2
9.	Tempat Parkir	50	M2
10.	Garasi Mobil	60	M2

Tabel 2.4
 Perlengkapan Dinas Perhubungan
 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran/ Jumlah	Satuan
11.	Lapangan Penumpukan	1	M2
12.	Gedung Terminal AKDP	4	Unit
13.	Rumah Dinas	26	Unit
14.	Genset	2	Unit
15.	Kendaraan Roda Empat	14	Unit
16.	Kendaraan Roda Tiga	1	Unit
17.	Kendaraan Roda Dua	29	Unit
18.	Speed Boat	1	Unit
19.	Peralatan Jembatan Timbang	1	Unit
20.	Alat Timbangan Portable	4	Unit
21.	Load Meter Light	3	Unit
22.	Alat Pengukur Kecepatan	1	Unit
23.	GPS	7	Unit
24.	Telepon	27	Unit
25.	Handy Talky (HT)	46	Unit
26.	Peralatan Komunikasi SSB	3	Unit
27.	Radio Rig	3	Unit
28.	Infocus	8	Unit
29.	Layar Proyektor	2	Unit
30.	Komputer	100	Unit
31.	Laptop	70	Unit
32.	Printer	99	Unit
33.	Mesin Ketik	10	Unit
34.	Meja	198	Unit
35.	Kursi	315	Unit
36.	Lemari	71	Unit
37.	Filing Cabinet	18	Unit

Tabel 2.4
 Perlengkapan Dinas Perhubungan
 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran/ Jumlah	Satuan
38.	Rak	15	Unit
39.	Brankas	2	Unit
40.	Jam Elektronik	5	Unit
41.	Kipas Angin	13	Unit
42.	AC	96	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5
 Capaian IKU Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	67%	62,66%	93,52
		Persentase Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kapasitas Terminal	83%	78,82%	94,96
		Persentase Jumlah Penumpang Angkutan SDP Terhadap Kapasitas Pelabuhan SDP	87%	85,22%	97,95

Tabel 2.6
 Capaian Kinerja tahun 2021 - 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2021	2022	
1.	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	60%	62,66%	104,43
		Persentase Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kapasitas Terminal	87%	78,82%	90,60
		Persentase Jumlah Penumpang Angkutan SDP Terhadap Kapasitas Pelabuhan SDP	95%	85,22%	89,71

Tabel 2.7
Korelasi Capaian Kinerja Terhadap Program kegiatan

Program	Capaian Anggaran		Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Target	Realisasi				
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.932.022.800	8.887.228.878	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	67%	62,66%
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kapasitas Terminal	83%	78,82%
Program Pengelolaan Pelayanan	368.954.800	345.717.180	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas	Persentase Jumlah Penumpang Angkutan SDP Terhadap Kapasitas Pelabuhan	87%	85,22%

			Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	n SDP		
--	--	--	--	-------	--	--

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, di samping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakikatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang - Undang Dasar 1945.

Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas, yang saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk, yang mana kemacetan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di sepanjang jalan. Beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

A. Penyediaan Layanan Transportasi

Belum optimalnya tingkat layanan transportasi umum bagi masyarakat baik dari jumlah alat transportasi maupun kenyamanannya, yang membuat sebagian besar masyarakat memilih untuk memiliki alat transportasi pribadi. Hal ini jika tidak terkontrol akan menambah beban tingkat kepadatan jalur transportasi jika tidak di barengi peningkatan jumlah akses jalan.

Sarana transportasi yang ada belum berperspektif gender dalam mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus, seperti kebijakan

perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khusus perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan.

B. Akses Transportasi

Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan, tingkat kepadatan pengguna jalan tidak dibarengi peningkatan akses jalan yang setara, rendahnya mobilitas terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan akibat terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan perkembangan armada di jalan, sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal, transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan

Terminal, terbatasnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan.

C. Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Rendahnya tidak kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap tata tertib di jalan, terutama pemahaman dan kepatuhan akan rambu-rambu lalu lintas, penggunaan alat keselamatan baik itu seperti helm maupun sabuk pengaman, serta tata tertib di jalan seperti penggunaan jalur yang masuk khusus pejalan kaki, sepeda, maupun kendaraan roda dua. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata sudah tua, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Guna menjawab tantangan di atas ada beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, yaitu :

A. Mengoptimalkan Peranan Media Massa Cetak dan Elektronik Guna Menyebarkan Informasi Terkait Permasalahan Keselamatan Berkendaraan.

B. Mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada peluang investasi seperti Pengembangan transportasi Angkutan Massal.

C. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang, serta memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Mengingat pertumbuhan suatu daerah tergantung dengan kualitas dari transportasinya sedangkan Kualitas transportasi ditinjau dari aspek konektivitas antar wilayah, keselamatan dan keamanan serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini masih beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikannya.

Sesuai dengan sistem pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 dan peraturan perundangan lain yang terkait, maka pengelolaan bidang perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di satu sisi, pembagian kewenangan ini akan mengurangi beban kerja, karena terdistribusi pada masing-masing tingkat pemerintahan, namun disisi lain menyebabkan kesulitan pada aspek koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pembangunan, terutama karena masih besarnya egoisme masing-masing pemerintah dan lembaga. Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintahan harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintah, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Mengingat besarnya peranan pihak masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sektor transportasi, maka peranan pemerintah akan lebih banyak

pada aspek fasilitator dan regulator. Dengan demikian aspek peraturan perundangan, penegakan hukum dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat penting.

3.1.1 Permasalahan Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Masih kurangnya Sarana Fasilitas Keselamatan Jalan yang menyebabkan tingginya Tingkat terjadi kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- b. Masih seringnya Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Pengguna lalu Lintas Jalan yang tidak mematuhi Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan.
- c. Masih Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang tersedia di Terminal Type B sehingga belum terlaksananya pelayanan angkutan di terminal Type B yang berdasarkan SPM.
- d. Masih seringnya terjadi pelanggaran lalu Lintas yang Lakukan oleh pengusaha Angkutan Jalan yang berupa Over Dimensi Over Loading yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- e. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan. Hal ini tidak terlepas dari kurang optimalnya aspek pengendalian dan standar yang ditetapkan. Kondisi ini juga diperparah dengan standar tarif angkutan umum yang rendah dan tidak ada subsidi pemerintah, sehingga pihak pengusaha angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang rendah.
- f. Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memberikan pelayanan menyebabkan kendaraan pribadi masih sangat dominan.
- g. Angkutan umum perkotaan masih didominasi oleh armada kecil (mikrolet).
- h. Belum terintegrasinya antar dan inter moda.
- i. Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh tidak disiplinnya berlalu lintas di jalan.

- j. Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap muatan lebih angkutan barang.

3.1.2 Permasalahan Angkutan Laut

- a. Masih Kurangnya Pelayan Taryek lintasan Angkutan Sungai sehingga belum terciptanya Konektifitas yang maksimal.
- b. Masih belum Tersentralisasi tempat Bongkar Muat kapal Angkutan Barang dan Angkutan Orang.
- c. Masih Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang tersedia di Pelabuhan Sungai sehingga belum terlaksananya pelayanan Angkutan Sungai yang berdasarkan SPM.
- d. Masih kurangnya Fasilitas Keselamatan Angkutan Sungai.
- e. Belum efektif dan efisiennya manajemen Pelabuhan Dwikora, sehingga kepadatan angkutan barang menjadi tinggi dikarenakan keterbatasan peralatan penunjang pelabuhan.
- f. Pelabuhan Terminal Induk KM 9,2 Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat belum berfungsi secara efektif dan maksimal dikarenakan dalam kondisi rusak berat, diperlukan untuk perbaikan mengingat masih difungsikan sampai sekarang.
- g. Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan Pelabuhan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, masih belum dilaksanakan karena saat ini pelabuhan regional masih menjadi kewenangan Departemen Perhubungan.
- h. Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan kurangnya peralatan dan pemeliharaan kapal khususnya kapal-kapal rakyat.

3.1.3 Permasalahan Angkutan ASDP

- a. Masih terbatasnya pelayanan ke Wilayah Kepulauan, terutama karena keterbatasan prasarana dan sarana, tingginya biaya operasional dan jumlah penumpang yang terbatas.

- b. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan.
- c. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi.
- d. Masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keamanan penumpang.
- e. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan.
- f. Masih perlunya subsidi untuk memberikan pelayanan angkutan sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.1.4 Permasalahan Angkutan Udara

- a. Masih seringnya terjadi delays / penundaan penerbangan yang tidak sesuai dengan schedul penerbangan yang telah di tentukan sehinga mengurangi kenyamanan penumpang pesawat yang menyebabkan kerugian waktu dari bagi penumpang pesawat.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Bandara Supadio Pontianak sudah mencapai 100%, namun landasan pacu masih perlu untuk ditingkatkan dengan naiknya permukaan air di landasan pacu seiring dengan tingginya curah hujan pada musim tertentu.
- c. Potensi pengembangan bandara, antara lain Tebelian Sintang sudah mulai beroperasi namun masih perlu pembenahan.
- d. Staus Bandara Supadio pontianak perlu di tingkatkan kembali menjadi status Bandara International mengingat perlu tercapainya konetifitas dengan negara tetangga untuk melayani rute penerbangan ke Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura mengingat sudah adanya maskapai yang berminat untuk melayani rute penerbangan seperti Lions, Citilink dan Air Asia.

3.1.5 Permasalahan Transportasi Terpadu

Pada dasarnya, pengertian sistem transportasi terpadu dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *pertama* terpadu dalam arti terintegrasinya pelayanan antar dan inter moda angkutan dan yang *kedua* adalah terpadu dalam arti suatu pelayanan terintegrasi mencakup berbagai aspek, misalnya pelayanan jasa moda angkutan itu sendiri, pelayanan prasarana pendukung, pelayanan jasa asuransi, pelayanan jasa kesehatan dan lain sebagainya. Mengingat penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kalimantan Barat, dari sisi pemerintahan, dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka kinerja pelayanan ini juga sangat ditentukan oleh kinerja seluruh stake holders tersebut. Sedangkan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a. Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan transportasi yang murah, aman dan nyaman.
- b. Kualitas pelayanan angkutan umum yang masih rendah.
- c. Belum adanya standar pelayanan yang baku yang harus dijadikan acuan oleh para penyelenggara pelayanan angkutan umum.
- d. Belum adanya subsidi dari pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan rendah.
- e. Karena rendahnya kualitas pelayanan menyebabkan preferensi masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum menjadi sangat rendah.
- f. Koneksi inter dan antar moda yang masih sangat kurang sehingga aksesibilitas dan kenyamanan penumpang masih rendah.
- g. Koordinasi lintas kabupaten dan kota yang masih rendah.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan

makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 juga mencantumkan target Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional adalah Konektivitas Poros Maritim, Konektivitas Multimoda, Keselamatan Transportasi dan Transportasi Perkotaan. Dengan berlandaskan pada isu strategis dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan, maka sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

B. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca, Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum dan meningkatnya tata kelola organisasi dan terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

C. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Tabel 3.1
Korelasi Sasaran Strategis Kementerian dengan
Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

No.	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024	Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan barat
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional.	Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Umum.
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi.	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis berpedoman pada Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, ke berdaya gunaan dan ke berhasil gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Daerah menghadapi pula berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih menggambarkan kinerja yang mempengaruhi penataan ruang Daerah, yaitu perubahan fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kalimantan Barat menurut BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kalimantan Barat pada periode 2013-2018 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional sebagaimana pada Gambar 2.1. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kalimantan Barat terbagi ke dalam 14 kabupaten/kota, meliputi 14 kabupaten yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara serta terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan, dan 5.316 desa.

Selain itu sesuai dengan karakteristik Kalimantan Barat, beberapa daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, dan lain-lain, yang perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik serta menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan.

Sinergitas dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Kalimantan Barat juga harus mempertimbangkan keterpaduan penataan

ruang wilayah yang mengakomodasi kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Kondisi Geografi Wilayah Kalimantan Barat

1. Karakteristik Lokasi Wilayah

a) Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km²), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km² setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
- 2) Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
- 4) Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa.

Tabel 3.3
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
Kab. Sambas	19	-	193
Kab. Mempawah	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	253
Kab. Sintang	14	16	390

Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	-	87
Kab. Melawi	11	-	169
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	-	117
Kota Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat	174	99	2.031

Sumber: RPJMD 2018-2023 Kalimantan Barat

b) Kondisi Geografis

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara.

Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

c) Topografi

Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat

ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng < 2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau 4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

d) Geologi

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas 6.714.126 Ha, sementara 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah Kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa.

Sementara itu dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kwarter. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan tanah Carboniferous jenis Effusive, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferus lainnya.

e) Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Barat cukup banyak, akan tetapi terdapat 3 (tiga) DAS terbesar diantaranya yakni DAS Kapuas, DAS Pawan dan DAS Jelai. Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah provinsi yang dijuluki dengan “**Seribu Sungai**”, julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kota Pontianak). Selanjutnya Kalimantan Barat memiliki Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar) dan Danau Luar I (5.400 hektar). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

f) Kimatologi

Posisi geografis Kalimantan Barat yang terletak di garis Khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Barat yakni Iklim Tropis dengan 2 (dua) musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Suhu udara di Kalimantan Barat relatif panas yang diikuti dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat, suhu udara di daerah Kalimantan Barat cukup normal dengan suhu terendah yang tercatat 18,10°C di Stasiun Meteorologi Susilo di Kabupaten Sintang pada bulan Desember 2019 dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 37,10°C pada Stasiun Meteorologi Pontianak, pada bulan Juni 2019. Pada Tahun 2019 tercatat dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat curah hujan di Kalimantan Barat tertinggi pada bulan Desember sebesar 869 mm di Stasiun Meteorologi Paloh Sambas dan rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan desember 2019 sebesar 609,25 mm, sedangkan rata-rata curah hujan terendah pada bulan September sebesar 82,5 mm. Sementara rata-rata dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat untuk Jumlah Hari Hujan Tahun 2019 terbanyak pada bulan November yakni 25 hari hujan.

g) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam Kalimantan Barat Dalam Angka 2020, total luas Kawasan budidaya di Kalimantan Barat adalah 6.429.721. Ha dan Kawasan Non Budidaya 8.322.447 Ha.

1.1. Demografi Wilayah Kalimantan Barat

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 semester II berjumlah sekitar 5.381.428 jiwa, dimana 51,44 persen atau 2.768.013 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48,56 persen atau 2.613.415 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 147.307 Km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2017 adalah 37 jiwa perkilometer persegi.

Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2017 Kota Pontianak merupakandaerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 6.108 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 8 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.2

Tabel 3.4

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan			
1.	Sambas	326,821	310,027	636,848	6,394.70	99.59
2.	Mempawah	157,117	149,241	306,358	1,276.90	239.92
3.	Sanggau	253,173	234,140	487,313	12,857.70	37.90
4.	Ketapang	297,769	275,305	573,074	31,240.74	18.34
5.	Sintang	212,315	198,419	410,734	21,635.00	18.98
6.	Kapuas Hulu	126,617	120,155	246,772	29,842.00	8.27
7.	Bengkayang	149,816	138,773	288,589	5,397.30	53.47
8.	Landak	210,512	190,635	401,147	9,909.10	40.48
9.	Sekadau	111,278	103,019	214,297	5,444.30	39.36
10.	Melawi	120,552	113,121	233,673	10,644.00	21.95

11.	Kayong Utara	65,698	61,603	127,301	4,568.26	27.87
12.	Kubu Raya	311,713	295,847	607,560	6,985.20	86.98
13.	Kota Pontianak	335,612	333,323	668,935	107.80	6,205.33
14.	Kota Singkawang	121,196	116,233	237,429	504.00	471.09
	Kalimantan Barat	2,800,189	2,639,841	5,440,030	146,807.00	37.58

Sumber: RPJMD Kalimantan Barat 2018-2023

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 69,43 persen atau sebanyak 3.776.988 jiwa merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tingginya penduduk usia produktif memberikan keuntungan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Sementara itu untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2019 yakni sebesar 25,69 persen atau sebanyak 1.397.449 jiwa, sedangkan untuk penduduk usia lanjut usia (kelompok 65 tahun ke atas) sebesar 4,98 persen atau sebanyak 265.593 jiwa. Informasi lebih lengkap terkait Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dapat dilihat pada tabel dan gambar piramida penduduk dibawah ini:

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (SEMESTER II)
0-4	338.092	357.026	353.602	367.424	341.389	493.951	390.585	387.857
5-9	492.380	484.997	504.855	489.131	495.173	489.430	506.517	508.237
10-14	537.637	542.815	551.336	512.493	508.100	458.230	500.347	502.828
15-19	476.124	484.196	491.460	498.301	513.977	440.563	524.301	511.570
20-24	500.702	480.403	461.344	476.726	472.498	428.916	473.302	485.634
25-29	526.624	506.978	491.347	489.376	481.172	419.951	449.671	447.578
30-34	524.995	511.498	493.591	510.663	490.491	403.606	462.908	461.988
35-39	431.036	438.276	449.713	453.257	475.324	384.982	463.567	459.426
40-44	367.065	365.189	366.041	388.266	391.156	349.041	400.792	419.209
45-49	293.576	306.190	312.687	316.891	333.022	300.595	334.079	341.405
50-54	248.053	252.848	247.604	253.796	254.254	250.929	277.408	287.110
55-59	189.837	196.678	211.899	207.861	219.436	202.243	223.298	221.237
60-64	134.930	144.877	139.421	147.672	151.919	150.418	167.662	179.456
65-69	92.117	100.524	102.834	100.457	107.311	101.566	116.296	110.347
70-75	66.026	70.117	70.954	70.399	69.541	65.539	73.189	72.497
>75	62.727	70.720	75.297	66.241	76.665	61.704	76.108	75.931
Total	5.281.921	5.313.332	5.323.985	5.348.954	5.381.428	5.001.664	5,440,030	5.472.310

Sumber: RPJMD Kalimantan Barat 2018-2023

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5,440,030 seperti

dalam tabel 2.3 di atas. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (59,91 persen), penganut agama Katholik (22.17 persen). Sedangkan penganut Kristen (11.49 persen), penganut Khonghucu (0,24 persen), Hindu (0,06 persen), dan Budha (6.69 persen). Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan agama

No	Agama	Pemelik (%)
1.	Islam	59.91
2.	Katholik	22.17
3.	Kristen	11.49
4.	Khonghucu	0, 24
5.	Hindu	0,06
6.	Budha	6.09

Sumber: RPJMD Kalimantan Barat 2018-2023

Untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama, terdapat rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut ada dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak parah. Lebih jelasnya jumlah dan keadaan rumah ibadah di Kalimantan Barat seperti tabel berikut:

Tabel 3.7
Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Agama	Kondisi Rumah Ibadah			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Islam	2947	2431	1989	7367
2.	Katholik	2801	1936	865	5602
3.	Kristen	3000	450	660	4110
4.	Khonghucu	39	23	15	77
5.	Hindu	-	15	1	16
6.	Budha	519	317	180	1016

Sumber: RPJMD Kalimantan Barat 2018-2023

I.2. Sumber Daya Alam Wilayah Kalimantan Barat

1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RT RW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; Kawasan peruntukan peternakan; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan

peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan pertahanan.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- 1) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:
- 2) 1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang;
- 3) 2. Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan
- 4) 3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Kawasan Perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 hektar yang diarahkan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Pengembangan Kawasan Hortikultura berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang diarahkan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

- d. Kawasan Peruntukan Perkebunan
- e. Kawasan peruntukan Peternakan
- f. Kawasan Peruntukan Perikanan
- g. Kawasan peruntukan pertambangan
- h. Kawasan peruntukan industri
- i. Kawasan peruntukan pariwisata
- j. Kawasan peruntukan permukiman

k. Kawasan peruntukan pertahanan

Jalan merupakan prasarana untuk mempermudah mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah oleh karena itu jalan mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan kegiatan lain secara umum. Panjang Jalan menurut status pengawasan dan kondisi jalan di Wilayah Kalimantan Barat sampai tahun 2019 tercatat 18.313,96 Km, Jalan Negara 2.117,56 Km, Jalan Provinsi 1.534,75 Km, jalan Kabupaten 14.661,64 Km.

I.3. Transportasi dan Pariwisata

a. Panjang Jalan

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, panjang jalan provinsi pada tahun 2021 sebesar 18.313,96 km, di mana tidak termasuk jalan tol. Adapun jumlah kendaraan bermotor ada tahun 2020 menurut data Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat sebesar 2.571.368 kendaraan, baik sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Sepanjang tahun 2020, jumlah barang yang dimuat menggunakan angkutan laut sebanyak 559.445 ton, sedangkan jumlah barang yang dibongkar sebanyak 1.34 juta ton.

b. Kondisi Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana untuk mempermudah mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah oleh karena itu jalan mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan kegiatan lain secara umum. Panjang Jalan menurut status pengawasan dan kondisi jalan di Wilayah Kalimantan Barat sampai tahun 2019 tercatat Jalan Negara 1.928,89 Km, Jalan Provinsi 1.534,75 Km, jalan Kabupaten 14.661,64 Km.

Tabel 3.8
Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan

Status Jalan	Kondisi Jalan (km)		Jumlah
	Baik	Rusak Berat	
Negara	1.960,88	63,18	2.117.56
Provinsi	762,18	771,83	1.534.75
Kabupaten	7.200,46	7.461,18	14.661.64

Jumlah/Total	9.924,26	8.296,19	18.313,96
---------------------	----------	----------	-----------

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020

c. Tingkat Kendaraan Bermotor

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tiap tahunnya dan dengan tidak adanya penambahan atau pelebaran ruas jalan akan berdampak pada kepadatan lalu lintas harian yang pada dasarnya akan mempengaruhi tingkat kecelakaan. Untuk mengantisipasi tingkat kecelakaan kendaraan bermotor, diperlukan tindak penanggulangan dari pemerintah seperti perbaikan prasarana jalan, fasilitas jalan, dan penegakkan hukum yang berlaku.

Jumlah Kendaraan Bermotor dilihat dari jenis kendaraannya jumlah Sepeda Motor sebanyak 131.940 unit, jumlah Bus sebanyak 28 Unit dan Mobil Penumpang sebanyak 9.846 Unit. Masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi berjenis Sepeda Motor dibandingkan dengan menggunakan transportasi Umum seperti BUS. Dilihat dari banyaknya jumlah Sepeda Motor bila dibandingkan dengan Jumlah Bus.

Tabel 3.9

Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kab/Kota dan Jenis Kendaraan di Kalbar tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akhir Tahun <i>End of Year</i>	Mobil Penumpang <i>Passenger Cars</i>	Bus <i>Buses</i>	Truk <i>Truck</i>	Sepeda Motor <i>Motorcycles</i>	Kendaraan Khusus <i>Special Vehicle</i>	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten Sambas	2019	432	2	212	13 370	8	14 024
	2020	336	1	200	8 999	7	9 543
	2021	456	1	357	13 382	7	14 203
Kabupaten Bengkayang	2019	222	1	93	3 850	6	4 172
	2020	187	-	101	3 690	4	3 982
	2021	277	2	148	5 455	-	5 882
Kabupaten Landak	2019	295	-	247	4 513	7	5 062
	2020	217	-	182	3 682	2	4 083
	2021	470	-	389	6 107	1	6 967
Kabupaten Mempawah	2019	365	2	161	5 260	-	5 788
	2020	253	-	64	3 038	-	3 355
	2021	368	-	112	4 253	-	4 733
Kabupaten Sanggau	2019	514	-	404	10 800	-	11 718
	2020	393	2	267	7 528	8	8 198
	2021	797	2	448	12 546	1	13 794
Kabupaten Ketapang	2019	1 261	2	975	15 100	19	17 357
	2020	1 001	-	804	11 318	4	13 127
	2021	1 434	4	1 148	15 782	2	18 370
Kabupaten Sintang	2019	523	1	320	11 316	2	12 162

	2020	373	-	207	8 556	6	9 142
	2021	483	1	333	11 875	5	12 697
Kabupaten Kapuas Hulu	2019	204	-	85	4 400	-	4 689
	2020	221	-	65	3 584	-	3 870
	2021	443	-	85	5 086	3	5 617
Kabupaten Sekadau	2019	130	-	115	4 945	4	5 194
	2020	129	-	126	3 437	2	3 694
	2021	231	-	180	5 894	2	6 307
Kabupaten Melawi	2019	226	-	108	4 749	-	5 083
	2020	163	1	74	3 686	-	3 924
	2021	324	-	212	5 664	1	6 201
Kabupaten Kayong Utara	2019	116	-	105	1 902	-	2 123
	2020	197	-	102	2 311	6	2 616
	2021	135	-	76	2 163	3	2 377
Kabupaten Kubu Raya *)	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
Kota Pontianak	2019	4 054	23	1 811	40 369	137	46 394
	2020	2 548	16	1 077	25 591	43	29 275
	2021	3 874	17	1 731	37 575	26	43 223
Kota Singkawang	2019	550	9	102	7 128	1	7 790
	2020	834	9	127	4 432	1	5 403
	2021	554	1	173	6 158	2	6 888
Kalimantan Barat	2019	8 892	40	4 738	127 702	184	141 556
	2020	6 852	29	3 396	89 852	83	100 212
	2021	9 846	28	5 392	131 940	53	147 259

d. Tingkat Kecelakaan

Kecelakaan yang terjadi di setiap wilayah selain dari kondisi prasarana jalan yang kurang baik, Factor lain yang mendukung adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, Dimana banyak pelanggaran di tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pelanggaran yang didominasi oleh pelanggaran kelengkapan surat-surat berjumlah 25.420, pelanggaran alat perlengkapan 12.094 dan sisanya pelanggaran lainnya. Data mengenai banyaknya pelanggaran lalu lintas menurut Kabupaten/Kota lima tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada diagram berikut.

Dari data umum yang telah disampaikan sebelumnya, data lain yang mendukung kegiatan ini tentunya adalah data mengenai jumlah kecelakaan dan penyebab kecelakaan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah korban kecelakaan tiap tahunnya selalu bertambah dari tahun ketahun, penyebab kecelakaan

terbesar adalah dari kendaraan sejumlah 1.054, jumlah penyebab kecelakaan dengan Kondisi jalannya sebesar 40. Banyaknya Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Meninggal Dunia yaitu 396 jiwa, Luka Berat 471 jiwa, dan Luka Ringan sebanyak 933 jiwa. data yang didapatkan merupakan data tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 3.10
Jumlah Penyebab Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Uraian/ Description	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penyebab Kecelakaan					
<i>The Causes of Accident</i>					
a. Kendaraan	2 310	2 165	1 054	-	8
<i>Motor Vehicle</i>					
b. Pengemudi	1 198	1 165	1 046	61	915
<i>Driver's Foul</i>					
c. Kondisi Jalan	44	41	40	1	15
<i>Roadway Condition</i>					
d. Pejalan kaki	173	174	59	8	-
<i>Pendestarian</i>					
e. Cuaca/ Weather	-	-	14	-	-
2. Korban kecelakaan					
<i>Accident Victim</i>					
a. Meninggal Dunia/Death	387	504	396	34	394
b. Luka Berat/ Major Injured	840	545	471	23	442
c. Luka Ringan/ Minor Injured	966	1 128	933	57	784
3. Kerugian Materil/ Material Loss					
	5 308 045 000	5 445 595 000	5 253 650 000	6 12 350 000	5 535 475 000
<i>(Rupiah/ Rupiahs)</i>					

Sumber : Dirlantas POLDA Kalimantan Barat, 2022

e. Perhubungan Darat

Jumlah Kendaraan Bermotor (Ranmor) yang tercatat pada Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat, secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2021, tercatat sebanyak 147.259 Kendaraan Bermotor dari berbagai jenis. Dengan diberlakukannya UU No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas, maka setiap kendaraan bermotor maupun pengemudinya diwajibkan mempunyai/ memiliki perijinan mengemudi. Jumlah Pengeluaran SIM pada tahun 2021 untuk SIM A baru 26.304 Perpanjangan 30.471, SIM B1 Baru 3.956 Perpanjangan 4.544, SIM B2 Baru sebanyak 1.710 perpanjangan 2.121 dan SIM C baru sebanyak 42.072 perpanjangan

77.271. Dengan demikian jumlah pengeluaran SIM selama tahun 2021 mencapai 188.453.

f. Angkutan Umum melalui PPLB Entikong, Transportasi Air dan Bongkar Muat Pelabuhan

Daerah Kalimantan Barat merupakan daerah yang banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku di pasaran, sehingga kegiatan ekspor komoditas daerah tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 total nilai ekspor Kalimantan Barat 1,88 milyar US\$ dengan nilai volume mencapai 20,8 juta ton, meningkat sebesar 11,11 persen dibanding tahun 2020 yang hanya 18,72 juta ton. Adapun pelabuhan yang banyak memberikan andil terhadap ekspor Kalimantan Barat adalah Pelabuhan Pontianak dengan nilai ekspor sebesar 1,15 miliar US\$ diikuti kemudian oleh pelabuhan Kendawangan dengan nilai ekspor sebanyak 507,79 juta US\$. Ekspor terbesar ke Tiongkok mencapai 678,05 juta US\$ dan ke India 352,94 juta US\$. Dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, keperluan akan barang modal dan bahan baku impor masih belum dapat dihindari. Nilai impor Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebesar US\$ 282,22 juta dengan volume 250,57 ribu ton. Berdasarkan negara asalnya, Kalimantan Barat paling banyak melakukan impor dari negara Malaysia dengan volume sebesar 45,29 ribu ton dengan nilai 122 juta US\$. Selanjutnya, impor dari negara Tiongkok sebesar 54,84 juta US\$ dan Singapura sebesar 47,58 juta US\$.

g. Bandar Udara

Data statistik perhubungan udara meliputi lalu lintas pesawat udara, pada tahun 2021, pesawat terbang yang berangkat dari Kalimantan Barat sebanyak 7.835 unit mengalami penurunan sebesar 21,88 persen dibanding tahun 2020, dan yang datang sebanyak 7.841 unit menurun sebesar 21,68 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 593.291 orang turun sebesar 25,15 persen, dan penumpang yang datang sebanyak 583.213 orang mengalami penurunan sebesar 25,95 persen dibanding tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 pandemi.

KONDISI TRANSPORTASI WILAYAH

I.1. Umum

Pembangunan transportasi mengacu pada rencana tata ruang yang mewadahi sistem aktivitas yang berkembang sesuai dengan kondisi geografi, demografi, sumber daya alam dan perkembangan kegiatan ekonomi.

Kalimantan Barat sebagai Provinsi berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia dengan luas wilayah daratan Luas 147.307 KM² dengan jumlah penduduk lebih dari 5.541.376 jiwa dan memiliki garis perbatasan dengan (Serawak Malaysia) sepanjang 966 KM yang terdiri dari 5 wilayah kabupaten , 15 Kecamatan dan 113 desa memiliki luas sekitar 25.197 KM² dengan penduduk 176.365 orang dengan rata2 kepadatan 8 orang/KM² dan Posisi Kalimantan Barat yang sangat strategis berdasarkan jaringan pelayaran yaitu berada di Alur Pelayaran Kepulauan Indonesia (ALKI-1) memiliki kondisi geografi, demografi, sumber daya alam dan perekonomian dengan karakteristik yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia , dengan demikian sesuai dengan fungsi transportasi sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi faktor-faktor tersebut serta sesuai dengan konsep rencana tata ruang Nasional, pulau dan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat maka kebijakan pembangunan transportasi wilayah dapat dilakukan berdasarkan karakteristik daerah perbatasan sebagai pintu gerbang atau beranda Depan Indonesia

I.2. Kondisi Saat Ini

I.2.1. Kinerja Pelayanan Transportasi

I.2.1.1. Transportasi Antar Negara/Internasional dan Nasional

1) Transportasi Antarmoda/Multimoda

Transportasi antarmoda/multimoda secara internasional dapat dilayani oleh angkutan darat, penyeberangan, laut, dan udara. Untuk angkutan penumpang di wilayah Kalimantan Barat telah terlayani Rute Trayek Bus Antar Negara (ALBN) yaitu Pontianak – Kuching dan Pontianak – Sarawak-Brunei Darussalam dan rute penerbangan ke luar negeri yang menghubungkan Pontianak Kalimantan Barat ke Kuching Sarawak Malaysia. Namun untuk keterpaduan pelayanan di wilayah perbatasan dengan Negara tetangga di Kalimantan Barat masih kurang optimal hal ini ditandai dengan akses jaringan jalan yang belum terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Kinerja aksesibilitas pelayanan transportasi secara internasional untuk angkutan barang masih belum optimal saat ini pelayanan angkutan barang khususnya yang menggunakan kontainer untuk kegiatan ekspor dari Indonesia harus transshipment ke pelabuhan Singapura atau Malaysia, termasuk kontainer untuk perdagangan intra-ASEAN hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki hub internasional yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul di mana kapal induk (mother vessel) yang dioperasikan oleh main line operator (MLO) dapat melakukan kunjungan langsung (direct call) guna menaikkan/menurunkan barang, untuk selanjutnya diteruskan ke pelabuhan pengumpan oleh feeder operator.

Keterpaduan jadwal pelayanan penumpang di simpul-simpul nasional darat, udara, laut, dan penyeberangan belum terpadu dengan jadwal pelayanan angkutan lanjutan.

Keterpaduan jaringan pelayanan transportasi multimoda untuk angkutan barang belum optimal, hal ini dapat terlihat dari belum terpadunya pelayanan antar moda melalui pengangkutan laut/perairan pada pelabuhan utama antar pulau dengan pengangkutan darat massal (*sea to rail and truck*).

2) Transportasi Darat

Jaringan Pelayanan Transportasi jalan di wilayah Kalimantan Barat dilayani oleh 2 Trayek Bus Antar Negara dan 1 trayek AKAP yaitu:

- a) Pontianak – Kuching yang melalui PLBN Entikong dilayani 40 Unit Bus berdasarkan kertas Kerja Sosek Malindo tahun 2023 (20 Unit Bus Indonesia dan 20 Unit Bus Sarawak) dan baru beroperasi sebanyak 20 Unit masing-masing 10 unit dari Indonesia dan 10 unit dari Malaysia yang dilayani oleh 2 Perusahaan Bus Kalimantan Barat (SJS dan DAMRI) dan 1 Perusahaan Bus Sarawak (Eva).
- b) Pontianak – Sarawak – Brunei Darussalam dilayani 18 Unit Bus berdasarkan BIMP-EAGA tahun 2022 (6 Unit Bus Indonesia, 6 Unit bus Sarawak dan 6 Unit Bus Brunei Darussalam), dilayani oleh 2 Perusahaan Bus Kalimantan Barat, 3 Perusahaan Bus Sarawak dan 2 Perusahaan Bus Brunei Darussalam
- c) Trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dilayani trayek Sungai Ambawang – Pangkalan Bun menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dilayani 5 Unit Bus dari Perum DAMRI Pontianak.

3) Transportasi Laut/Penyeberangan

Pergerakan penumpang antar negara dan wilayah terjadi pada rute dari dan ke Pontianak yang dilayani oleh 6 (Enam) kapal dalam 5 trayek.

Jaringan transportasi penyeberangan antar pulau di Kalimantan Barat terdapat 2 lintasan Penyeberangan antar Provinsi yaitu:

- a) Lintasan Penyeberangan Ketapang – Manggar Bangka Belitung merupakan Lintasan penyeberangan Sabuk Selatan yang menghubungkan Ketapang Kalimantan Barat dengan Bangka Belitung dilayani Kapal KM. Sabuk Nusantara 30, KM Darma Kartika VII, dan KM. Cantika Lestari 8F.
- b) Lintasan Penyeberangan Sintete – Natuna merupakan lintasan sabuk utara yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kepulauan Riau dilayani oleh Kapal KM. Bukit Raya, KM. Lawit, KM. Sabuk Nusantara 80.

4) **Transportasi Udara**

Transportasi udara di Kalimantan Barat dilayani oleh Prasarana Bandara Udara Pengumpul yang melayani penerbangan domestik dan internasional sebanyak satu bandara (Bandara Supadio) yang melayani :

- a) Rute penerbangan Internasional Pontianak – Kuching yang dilayani oleh wing air dan Mas wings, namun pada tahun 2023 bandara Supadio ditetapkan status sebagai bandara penerbangan domestic.

Pertumbuhan kargo udara antar negara mengalami peningkatan setiap tahun. Aksesibilitas kargo dipengaruhi volume dan kapasitas angkut pesawat udara.

Data penerbangan Internasional dan Nasional di Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- a) Jumlah Flight 72 penerbangan
- b) Penumpang 2.184.525 (data Tahun 2022)
- c) Cargo 10 Flight

I.2.1.2. Transportasi Wilayah

1) Transportasi Antarmoda/Multimoda

Keterpaduan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi dapat diukur melalui keberadaan angkutan pemadu moda. Saat ini belum ada di Kalimantan Barat baru ada pelayanan angkutan orang bus pemadu moda dari Bandara Supadio ke Singkawang dan Sambas.

Sedangkan keterpaduan angkutan barang dapat diukur dari peran kereta api sebagai sebagai pengumpan yang menangani pergerakan barang dari terminal ke terminal baik terminal di pelabuhan laut dan udara maupun terminal di *inland logistic center*, dimana saat ini pelayanan kereta api belum ada di Kalimantan Barat.

Keterpaduan jadwal pelayanan penumpang di simpul-simpul Wilayah pada moda Transportasi darat, udara, laut, sungai dan penyeberangan belum terpadu dengan jadwal pelayanan angkutan lanjutan.

Keterpaduan jaringan pelayanan transportasi multimoda untuk angkutan barang belum optimal, hal ini dapat terlihat dari belum terpadunya pelayanan antar moda melalui pengangkutan laut/perairan pada pelabuhan utama antar pulau dan Pelabuhan Regional dengan pengangkutan darat massal (*sea to rail and truck*).

2) Transportasi Darat

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daratan sebesar 147.307 km², panjang jalan adalah 18.313,96 .km, maka rasio aksesibilitas jalan di Kalimantan Barat adalah 0.003 atau 3 km per 1.000 km².

Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 5.541.376 jiwa terdapat jumlah sebanyak 69 trayek, panjang trayek 411 dengan jumlah armada bus ALBN, AKAP dan AKDP sebanyak bus dan seat tersedia sebanyak 12.330

seat maka rasio kinerja jaringan pelayanan sebesar 0,0022 atau tersedia 22 seat per 10.000 penduduk.

Pelayanan transportasi Angkutan jalan di wilayah Kalimantan Barat sebanyak 65 rute trayek Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilayani 348 Unit Bus AKDP dan dilayani 19 Perusahaan Bus

Pelayanan transportasi Angkutan jalan di Kalimantan Barat sebanyak 65 rute trayek Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilayani 348 Unit Bus AKDP dengan Load Faktor Tahun 2015 – 2023 sebesar 44,00 %.

3) Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan

Aksesibilitas transportasi penyeberangan dapat diukur dari perbandingan antara jumlah lintasan dengan luas wilayah . Aksesibilitas pelayanan transportasi penyeberangan di Kalimantan Barat yang mempunyai 2 lintas penyeberangan antar pulau dan 1 lintasan penyeberangan antar kab/kota adalah 0.00002.

Aksesibilitas transportasi Angkutan Sungai dikalimantan Barat dapat diukur dari perbandingan antara jumlah Trayek Angkutan Sungai dengan Panjang DAS Sungai di Kalimantan Barat yang dapat di layari oleh angkutan sungai.

Dimana di Kalimantan barat terdapat 28 Trayek Angkutan sungai yang menghubungkan 14 kabupaten/kota. jumlah panjang sungai yang dapat dilayari 2707,3 Km dan dilayani 15 Perusahaan.

Pelayanan transportasi penyeberangan yang melayani antar Kabupaten/Kota yaitu Lintasan Penyeberangan Rasau Jaya – Teluk Batang yang dilayani oleh 4 unit Kapal Ferry Penyeberangan dilayani 2 Perusahaan Kapal Penyeberangan. Selain itu juga terdapat Lintasan Penyeberangan Sumber

Agung – Seponti Jaya yang dilayani oleh 1 unit Kapal Ferry
Penyeberangan dilayani 1 Perusahaan Kapal Penyeberangan

NO.	TRAYEK / LINTASAN	NAMA KAPAL / LONG BOAT	NAMA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	TANDA SELAR	KAPASITAS PENUMPANG PERTAHUN
1	2	3	4		5	6
1.	Pontianak - Teluk Batang	1. KM. Bone	CV. Fajar Jaya (Salbiah)	Jl. Dwikora No. 3 Pontianak	GT. 31 No. 186 / GKB	4816
		2. KM. Bone - I	CV. Fajar Jaya (Salbiah)	Jl. Dwikora No. 3 Pontianak	GT. 66 No. 187 / GKB	6192
		3. KM. Bone - II	CV. Fajar Jaya (Salbiah)	Jl. Dwikora No. 3 Pontianak	GT. 127 No. 3960 / GKB	10200
		1. LB. Express Ertana Lestari Mandiri	PT. Ertana Lestari Mandiri	Jl. Dr. Wahidin. S Gg. Sepakat 8 No. E 88 Pontianak	KB.PTK.1846 GT. 3 / 02 / 17	2322
		2. LB. Express Ertana Lestari mandiri	PT. Ertana Lestari Mandiri	Jl. Dr. Wahidin. S Gg. Sepakat 8 No. E 88 Pontianak	KB.PTK.1845 GT. 3 / 11 / 16	2322
		3. SB. Rajawali Express - 06	CV. Rajawali Fiber	Jl. Sultan Agung RT/RW. 36/10Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya	KB.KR.414 GT. 3,30/4/2018	
		4. SB. Rajawali Express - 09	CV. Rajawali Fiber	Jl. Sultan Agung RT/RW. 36/10Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya	KB.KR.436 GT. 3/12/19	3268
		1. LB. Ertana Lestari Mandiri Express	PT. Ertana Lestari Mandiri	Jl. Dr. Wahidin. S Gg. Sepakat 8 No. E 88 Pontianak	KB.PTK.1847 GT. 4 / 02 / 17	2924
2.	Pontianak - Sukadana	2. LB. Indo Kapuas Express - VII	CV. Indo Kapuas	Jl. Desa Kubu Kelang Jaya RT/RW. 04/02 Kec. Kubu KKR	KB. KR 307 GT. 4,50 / 8 / 2015	2924
		3. LB. Manchester United	Pendi	Jl. Karet Komp. Karet Permata Khatulistiwa	KB. PTK. 1758 GT. 2 / 09 / 12	2322
		4. LB. Real Madrid	CV. Sinergi Cipta Mandiri	Jl. Kota Karang RT/RW. 05/02 Desa Sutera Kec. Sukadana	GT. 3 / KU - 24	2322
		5. LB. Borneo Jaya Abadi - VII	CV. Borneo Jaya Abadi	Jl. Parit H. Muksin II Komp. Griya Hosana No. A 6 Pontianak	KB. KR. 367	
3.	Pontianak - Sungai Radak - Buntut Limbung	1. KM. Sumber Anyar	CV. Kilat Service	Jl. Putri Candramidi Gg. Suka Damai No. 17 B Pontianak	GT. 25 NO. 1019/GKB	3430
		2. KM. Usaha Baru - 03	CV. Kilat Service	Jl. Putri Candramidi Gg. Suka Damai No. 17 B Pontianak	GT. 12 NO. 2626/GKB	1424
		3. KM. Aneka Suci - III	CV. Kilat Service	Jl. Putri Candramidi Gg. Suka Damai No. 17 B Pontianak	GT. 32 NO. 1596/GKB	2108
		4. KM. Fajar Usaha	CV. Kilat Service	Jl. Putri Candramidi Gg. Suka Damai No. 17 B Pontianak	GT. 9 NO. 139 / GKB	1042
4.	Pontianak - Terindak	1. LB. Melly Express	Mulyadi	Dusun Sidoasri Desa Sungai Radak Kec. Terentang KKR	KB. KR. 421 GT. 5,40 / 07 / 2018	860
		1. KM. Melly Jaya	PT. Nanggala Utama	Jl. Budi Utomo No. 20 Siantan Hulu Pontianak	GT. 15 NO. 3231 / GKB	3010
		1. KM. Hasil Rejeki	CV. Kilat Service	Jl. Putri Candramidi Gg. Suka Damai No. 17 B Pontianak	GT. 105 NO. 2967/GKB	7396
		6.	Rasau Jaya - Teluk Batang	1. KM. Nabila	M. Saleh	Jl. H. Bujang Atim RT/RW. 007/004 Desa Batu Ampar KKR
2. KM. Nabila - II	M. Saleh			Jl. H. Bujang Atim RT/RW. 007/004 Desa Batu Ampar KKR	GT. 33 NO. 1763 / GKB	7958
3. KM. Melano Khatulistiwa - IV	Masnah			Dusun Rasau Utama Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya	GT. 61 NO. 2947 / GKB	9890
4. KM. Arif Jaya	Saidi Matsah			Dusun Rasau Utama Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya	GT. 63 NO. 2340 / GKB	9660
5. KM. Ulfa	Ramlan			Dusun Rasau Utama Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya	GT. 35 NO. 133 / GKB	5262
6. KM. Bintang Fortuna	Heriyanto			Dusun Rasau Utama Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya	GT. 30 NO. 3124 / GKB	5262
7. KM. Perintis Jaya - 01	Herman			Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kec. Rasau Jaya KKR	GT. 105 No. 4186/GKB	
	Rasau Jaya - Teluk Batang	1. KM. Perintis Jaya - 02	Hari	Sungai Durian Laut No. 12 Desa Limbung Kec. Sungai Raya KKR	GT. 16 No. 4187/GKB	
		1. LB. Digdoyo Perkasa Edgina	Octavianus Digdoyo	Dusun IV Purwodadi Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya KKR	KR. 202	2322
		2. LB. Digdoyo Perkasa - 01	Octavianus Digdoyo	Dusun IV Purwodadi Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya KKR	KR. 111	2321
		3. LB. Digdoyo Perkasa - 02	Octavianus Digdoyo	Dusun IV Purwodadi Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya KKR	KR. 403	2324
		4. LB. Rajawali Express - 01	Gunawan Sinaga	Jl. Sultan Agung Desa Rasau Jaya Satu Kab. Kubu Raya	KB.KR.408 GT. 2 / 10 / 2017	2326
		5. LB. Rajawali Express - 02	Gunawan Sinaga	Jl. Sultan Agung Desa Rasau Jaya Satu Kab. Kubu Raya	KB.KR.409 GT. 2 / 10 / 2017	2327
		6. LB. Rajawali Express - 05	Gunawan Sinaga	Jl. Sultan Agung Desa Rasau Jaya Satu Kab. Kubu Raya	KB.KR. 420 GT. 3,22/5/18	2323
7.	Rasau Jaya - Teluk Melano	7. LB. Rajawali Express - 06	Gunawan Sinaga	Jl. Sultan Agung Desa Rasau Jaya Satu Kab. Kubu Raya	KB.KR. 414 GT. 2,50/4/18	2325
		1. LB. Indo Kapuas Express - VI	CV. Indo Kapuas	Jl. Desa Kubu Kelang Jaya RT/RW. 04/02 Kec. Kubu KKR	KR. 307 GT. 4,50 / 8 / 2015	2320
		2. LB. Indo Kapuas Express - III	CV. Indo Kapuas	Jl. Desa Kubu Kelang Jaya RT/RW. 04/02 Kec. Kubu KKR	KR. 51 GT. 2 / 11 / 09	2319
		3. LB. Indo Kapuas Express - I	CV. Indo Kapuas	Jl. Desa Kubu Kelang Jaya RT/RW. 04/02 Kec. Kubu KKR	KR. 53 GT. 1 / 11 / 09	2324
		4. LB. Borneo Jaya Abadi - VI	CV. Borneo Jaya Abadi	Jl. Parit H. Mukhsin II Komp. Griya Hosana No. A 6 Pontianak	KB. KR. 307	
		5. LB. Borneo Jaya Abadi - I	CV. Borneo Jaya Abadi	Jl. Parit H. Mukhsin II Komp. Griya Hosana No. A 6 Pontianak	KB. KR. 51	
		6. LB. Borneo Jaya Abadi - II	CV. Borneo Jaya Abadi	Jl. Parit H. Mukhsin II Komp. Griya Hosana No. A 6 Pontianak	KB. KR. 52	
		6. LB. Borneo Jaya Abadi - III	CV. Borneo Jaya Abadi	Jl. Parit H. Mukhsin II Komp. Griya Hosana No. A 6 Pontianak	KB. KR. 53	

RENSTRA 2024 – 2026

DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR

4) Transportasi Laut

Pergerakan penumpang dan barang antar kabupaten/kota (Regional) di Kalimantan Barat dilayani oleh kapal dengan total kapal yang dioperasikan sebanyak 6 (Enam) unit. Dengan Jumlah Kapal 6 (Enam) Buah, Penumpang 4170 orang dan Barang.

Dari sisi waktu pelayanan, kinerja pelayanan kapal penumpang dinilai belum tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah kedatangan kapal yang tepat waktu dengan jumlah kedatangan seluruh kapal di pelabuhan. Demikian pula untuk kapal barang.

Indikator kecepatan dan kelancaran kinerja pelayanan kapal dan kapal barang dapat dinilai dari lama kapal di pelabuhan atau turn round time, yang saat ini masih tinggi.

5) Transportasi Udara

Pada pelayanan transportasi udara di Kalimantan Barat terdapat 3 Bandar Udara pengumpan dengan melayani 7 (Tujuh) rute penerbangan regional dalam Wilayah Kalimantan Barat data penerbangan regional sebanyak 7 (Tujuh) rute penerbangan dan dilayani 10 (Sepuluh) maskapai penerbangan

Pada tahun 2022 rute penerbangan dalam wilayah Kalimantan Barat ada 25 rute. Rute penerbangan di Kalimantan Barat di dominasi oleh rute penerbangan antar provinsi atau antar pulau dan terdapat 4 (Empat) rute penerbangan perintis yang melayani penerbangan kota dan kabupaten di Kalimantan Barat yang masih sangat rendah demandnya dan minin menggunakan akses darat.

Transportasi kargo udara di wilayah Kalimantan Barat khususnya antar kota/kabupaten masih sangat rendah. Sebagian besar pengiriman barang dilakukan lewat sungai, laut maupun transportasi darat.

Rute Penerbangan Domestik Antar pulau atau provinsi yang dilayani oleh 10 maskapai, diantaranya Wings Air, Batik Air,

Citilink, Garuda Indonesia, Lion Air, NAM Air, Pelita Air, Super Jet Air, Susi Air dan Sriwijaya Air.

I.2.2. Jaringan Prasarana Transportasi

I.2.2.1. Transportasi Antar Negara/Internasional dan Nasional

1) Transportasi Jalan

Jaringan Prasarana Transportasi Jalan di Kalimantan Barat:

- a) Terminal tipe A di Kalimantan Barat sebanyak 1 Unit yaitu Terminal Sungai Ambawang yang melayani Trayek AKAP dan ALBN.
- b) Terminal barang Internasional (TBI) di Kalimantan Barat
Di Kalimantan Barat terdapat 1 Unit Terminal Barang Internasional (TBI) di Entikong sudah selesai pembangunan dan siap beroperasi yang melayani angkutan barang ekspor impor dengan kode Port ETK-ID. Sedangkan Terminal Barang Internasional di Badau dan Aruk masih dalam proses pembangunan
- c) Terminal barang Internasional untuk kepentingan sendiri
Terdapat 1 terminal barang Internasional untuk kepentingan sendiri, yakni oleh PT. Citrakarya Sentosa Mandiri (PT. CSM) di Badau, dengan kode port INBF-ID.
- d) Prasarana Jalan di Kalimantan Barat yang menghubungkan simpul-Jaringan transportasi nasional sebanyak 92 ruas Jalan Nasional (berdasarkan SK no. 430/KPTS/M/2022), dengan total panjang 2.387,52 Km dan kondisi Baik 1960,88 km, rusak 63,18 Km dan dalam kondisi sedang 363,46 Km.

2) Transportasi Laut

Jaringan prasarana transportasi Laut di Kalimantan Barat terdapat 1 Pelabuhan utama (Pelabuhan Dwikora), yang melayani angkutan penumpang dan barang yang menghubungkan antar pulau atau pelayanan tingkat internasional.

Terminal Kijing pelabuhan Pontianak merupakan pengembangan pelabuhan Pontianak yang telah dioperasikan tahun 2021 dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- ✓ Dermaga Curah Cair : 500 m x 50 m
- ✓ Dermaga Peti Kemas : 750 m x 50 m
- ✓ Dermaga Curah Kering : 389 m x 50 m
- ✓ Dermaga Multipurpose : 250 m x 50 m
- ✓ Lapangan Penumpukan : 58.898 m² (Kap. 68.020 Ton)
- ✓ Luas Gedung Terminal Penumpang : 2.000 m²
- ✓ Luas Lap. Parkir Terminal Penumpang : 3.667 m²

3) **Transportasi Udara**

Jaringan Prasarana Transportasi Udara di Kalimantan Barat terdapat 1 buah Bandara pengumpul Sekunder yaitu:

- ✓ Bandara Supadio Kubu Raya
 - Landas Pacu 2600 x 45 m.
 - Apron 47.200 m².
 - Terminal Penumpang 32.000 m².
 - Terminal Cargo 915 m².
 - Tempat Parkir kendaraan 21.615 m².
 - Kemampuan Landing pesawat B-737 900 ER.

I.2.2.2. **Transportasi Wilayah**

1) **Transportasi Jalan**

Jaringan Prasarana Transportasi Jalan di Kalimantan Barat:

- a) Terminal Type B di Kalimantan Barat di Kalimantan Barat terdapat 12 (dua belas) unit terminal yang melayani Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yaitu
 1. Terminal Pasar Sambas (Sesuai SK Gubernur)
 2. Terminal Pasiran Singkawang (Melayani AKDP);
 3. Terminal Bengkayang (Melayani AKDP);
 4. Terminal Ngabang (Melayani AKDP);
 5. Terminal Mempawah (Melayani AKDP);
 6. Terminal Batulayang Pontianak (Melayani AKDP);
 7. Terminal Sanggau (Melayani AKDP);
 8. Terminal Lawang Kuari Sekadau (Melayani AKDP);
 9. Terminal Sido Mulyo Nanga Pinoh (Sesuai SK Gubernur);

10. Terminal Pemangkat (Melayani AKDP)
11. Terminal Tayan (Melayani AKDP)
12. Terminal Entikong (Melayani AKDP)
13. Terminal Kedamin, Kapuas Hulu (Sesuai SK Gubernur)
14. Terminal Sungai Ukoi, Sintang (Sesuai SK Gubernur); dan
15. Terminal Sungai Durian (Melayani AKDP)

b) Prasarana Jalan di Kalimantan Barat yang menghubungkan simpul - Jaringan transportasi provinsi sebanyak **65** ruas Jalan Provinsi (berdasarkan SK no. 1430/DPUPR/2022 tentang ruas-ruas jalan menurut status dan fungsinya sebagai jalan provinsi di Kalimantan Barat), dengan total panjang **1.530,40** Km dan kondisi Baik **1960,88** km, rusak **63,18** Km dan dalam kondisi sedang **363,46** Km.

2) **Transportasi** Sungai, danau dan Penyeberangan

a) Jaringan Prasarana Transportasi sungai dan danau di Kalimantan Barat yaitu:

- ✓ Pelabuhan Sungai Kapuas Indah (Kota Pontianak)
- ✓ Pelabuhan Sungai Kapuas Besar (Kota Pontianak)
- ✓ Pelabuhan Sungai Seng Hie (Kota Pontianak)
- ✓ Pelabuhan Sungai Raya (Kab. Kubu Raya)
- ✓ Pelabuhan Sungai Rasau Jaya (Kab. Kubu Raya)
- ✓ Pelabuhan Sungai Sungai Durian (Kab. Kubu Raya)
- ✓ Pelabuhan Sungai Terentang (Kab. Kubu Raya)
- ✓ Pelabuhan Sungai Sukulanting (Kab. Kubu Raya)
- ✓ Pelabuhan Sungai Sungai Radak (Kab. Kubu Raya)
- ✓ Pelabuhan Sungai Muara Tiga (Kab. Kubu Raya)
- ✓ Pelabuhan Sungai Teluk Batang (Kab. Kayong Utara)
- ✓ Pelabuhan Sungai Teluk Melano (Kab. Kayong Utara)
- ✓ Pelabuhan Sungai Sukadana (Kab. Kayong Utara)
- ✓ Pelabuhan Sungai Dusun Besar (Kab. Kayong Utara)
- ✓ Pelabuhan Sungai Durian Sebatang (Kab. Kayong Utara)
- ✓ Pelabuhan Sungai Seponti Jaya (Kab. Kayong Utara)

- ✓ Pelabuhan Sungai Nanga Pinoh (Kab. Melawi)
- ✓ Pelabuhan Sungai Serawai (Kab. Sintang)
- ✓ Pelabuhan Sungai Jongkong (Kab. Kapuas Hulu)

b) Jaringan Prasarana Transportasi Penyeberangan di Kalimantan Barat yaitu :

1. Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya (Kab. Kubu Raya)
2. Pelabuhan Penyeberangan Sumber Agung (Kab. Kubu Raya)
3. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Batang (Kab. Kayong Utara)
4. Pelabuhan Penyeberangan Seponti Jaya (Kab. Kayong Utara)

3) Transportasi Laut

Jaringan prasarana transportasi Laut di Kalimantan Barat terdapat 3 unit Pelabuhan laut pengumpan/regional yaitu :

- ✓ Pelabuhan Padang Tikar
- ✓ Pelabuhan Mempawah (Regional)
- ✓ Pelabuhan Tanjung Satai

Dan terdapat 7 unit Pelabuhan laut pengumpul/nasional yaitu :

- ✓ Pelabuhan Ketapang
- ✓ Pelabuhan Sintete
- ✓ Pelabuhan Merbau Paloh
- ✓ Pelabuhan Kendawangan
- ✓ Pelabuhan Teluk Melano
- ✓ Pelabuhan Teluk Air

4) Transportasi Udara

Bandara pengumpan sebagai bandara Tersier di Kalimantan Barat yang melayani rute penerbangan regional atau antar kota dalam provinsi yaitu :

- ✓ Bandara Rahadi Osman Ketapang

- ✓ Bandara Tebelian Sintang
- ✓ Bandara Pangsuma Putussibau
- ✓ Bandara Nanga Pinoh

Kondisi Yang Diharapkan

I.2.3. Kinerja Pelayanan Transportasi

a. Transportasi antarmoda/multimoda

- 1) Peningkatan keterpaduan pelayanan di wilayah perbatasan dengan negara di Kalimantan Barat dengan membangun akses jaringan jalan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal kereta api.
- 2) Angkutan barang kontainer untuk kegiatan ekspor dari Indonesia Khususnya di Kalimantan Barat diharapkan dapat langsung dikirim untuk perdagangan intra-ASEAN dengan adanya pelabuhan hub internasional Yaitu Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dan Terminal Barang internasional (TBI) di Entikong Kalimantan barat sehingga dapat tercipta *one stop services* pada angkutan barang.
- 3) Keterpaduan jadwal pelayanan penumpang di simpul-simpul nasional darat, udara, laut, dan penyeberangan dengan jadwal pelayanan angkutan lanjutan.
- 4) Peningkatan keterpaduan jaringan pelayanan transportasi multimoda untuk angkutan barang melalui pengangkutan laut/perairan pada pelabuhan utama antar pulau dan regional dengan pengangkutan darat massal (*sea to rail and truck*).

b. Transportasi darat

- 1) Meningkatnya jaringan pelayanan transportasi jalan antara Kalimantan Barat Indonesia dengan negara tetangga (Sarawak dan Brunei Darusaalam) dengan pengembangan trayek Bus Antar Negara melalui 5 border lintas Batas atau PLBN di Kalimantan Barat yaitu Entikong, Aruk, Badau, Jagoi Babang, dan Sungai Kelik
- 2) Meningkatnya jaringan pelayanan antara kota Antar Provinsi di Pulau Kalimantan dan Mendukung konektifitas Kalimantan Barat dengan Nusantara IKN (Ibukota Negara) baru di Kalimantan Timur melalui pembukaan 3 gerbang darat yaitu Jalur Utara (Nanga Era Kabupaten

Kapuas Hulu), Jalur Tengah (nanga Ela Kabupaten Melawi) dan jalur Selatan (Nanga Tayap Kabupaten Ketapang)

- 3) Meningkatnya pelayanan angkutan feeder terminal Tipe A
- 4) Meningkatnya pelayanan angkutan perkotaan dengan Angkutan Massal yang menghubungkan pusat kegiatan dan Kawasan Bisnis khususnya di ibukota provinsi Kalimantan Barat dan Ibukota setiap Kabupaten
- 5) Meningkatnya jaringan pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan antar Kota dan Ibukota Kabupaten Serta PKSNI di Kalimantan Barat
- 6) Meningkatnya pelayanan angkutan feeder terminal Tipe B di setiap Kabupaten dan Kota
- 7) Meningkatkan konektivitas/terbukanya keterisolasian dengan angkutan bus perintis yang melayani daerah pedalaman yang terpencil dan terisolasi dalam menunjang desa mandiri

c. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 1) Meningkatnya pelayanan transportasi penyeberangan yang sudah terhubung dengan lintas pelayanan penyeberangan Sabuk Selatan, Sabuk Tengah, Sabuk Utara, Penghubung Sabuk dan Konektivitas dan dukungan jaringan prasarana jalan nasional di wilayah Kalimantan Barat
- 2) Meningkatnya pelayanan transportasi penyeberangan yang menghubungkan dengan Pulau Jawa
- 3) Meningkatnya pelayanan Angkutan Sungai yang melayani Antar Kota/Kabupaten
- 4) Meningkatnya pelayanan Angkutan Barang melalui sungai sebagai feeder Terminal Kijing Pelabuhan Utama Pontianak
- 5) Meningkatnya pelayanan transportasi penyeberangan dimasa mendatang wilayah Kalimantan Barat yang sudah terhubung dengan lintas pelayanan penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dan Konektivitas Lokal serta adanya dukungan jaringan prasarana jalan Provinsi.

- 6) Meningkatkan konetifitas angkutan sungai perintis yang melayani daerah pedalaman yang terpencil dan terisolasi yang tidak ada akses jalan darat

d. Transportasi laut

- 1) Jumlah trayek Angkutan laut meningkat sehingga rasio aksesibilitas pelayanan antar negara meningkat.
- 2) Meningkatnya jumlah armada nasional dalam mengangkut muatan ekspor dan impor (antar negara).
- 3) Meningkatnya jumlah kapasitas kapal untuk melayani pergerakan antarnegara.
- 4) Meningkatnya pangsa muatan armada nasional untuk angkutan laut antar Negara.
- 5) Meningkatnya jumlah kapal dan waktu pelayanan oleh kapal berbendera nasional.
- 6) Mengoptimalkan lama waktu kapal di pelabuhan atau *turn round time* agar dapat melayani penumpang dengan lancar dan tepat waktu.
- 7) Meningkatnya frekuensi dan jumlah kapal yang melayani pergerakan penumpang antar pulau.
- 8) Meningkatnya frekuensi dan jumlah kapal barang yang melayani pergerakan antarpulau.
- 9) Meningkatnya frekuensi pelayanan kapal untuk melayani pergerakan antar penumpang.
- 10) Meningkatnya pangsa muatan armada nasional untuk angkutan laut dalam negeri.
- 11) Meningkatnya ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kapal.
- 12) Menurunnya lama waktu kapal di pelabuhan atau *turn round time*.
- 13) Meningkatnya frekuensi dan jumlah kapal yang melayani pergerakan penumpang Regional Dalam wilayah priovinsi Kalimantan Barat

- 14) Meningkatnya frekuensi dan jumlah kapal barang yang melayani pergerakan Regional Dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat
- 15) Meningkatnya pangsa muatan armada Regional untuk angkutan laut dalam negeri.

e. Transportasi udara

- 1) Jumlah bandar udara yang mampu dan potensial untuk melayani penerbangan ke luar negeri harus ditingkatkan sehingga aksesibilitas akan meningkat.
- 2) Kemudahan dalam pengangkutan barang-barang/kargo udara.
- 3) Jumlah penumpang yang meningkat harus diimbangi dengan sarana (jumlah seat yang tersedia) semakin banyak dan daya tampung yang memadai di setiap bandar udara.
- 4) Kapasitas barang, bagasi dan pos udara serta kemudahan pengemasan administrasi harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan pengiriman barang ke luar negeri.
- 5) Meningkatnya ketepatan kedatangan dan keberangkatan pesawat.
- 6) Terlayannya konektivitas antarpulau dan Provinsi di seluruh Indonesia.
- 7) Terlayannya konektivitas antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui angkutan udara
- 8) Perlu inovasi transportasi udara untuk menghubungkan daerah dalam jarak pendek.

I.2.4. Jaringan Prasarana Transportasi

a. Transportasi Antarmoda/Multimoda

- 1) Keterpaduan jaringan prasarana transportasi antarmoda/multimoda internasional untuk memperlancar arus barang dan mobilitas orang.
- 2) Keterpaduan pembangunan jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara di Kalimantan Barat yang didukung penyediaan

prasarana *transshipment* untuk menghubungkan antar simpul transportasi wilayah.

b. Transportasi Darat

- 1) Meningkatnya jaringan prasarana Transportasi Jalan yaitu Terminal tipe A di Kalimantan Barat ada sebanyak 1 unit di Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya menjadi 3 dengan penambahan di Singkawang dan Sintang
- 2) Meningkatnya jaringan prasarana Transportasi Jalan yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) di Kalimantan Barat ada sebanyak 1 unit TBI di Entikong Kabupaten Sanggau diharapkan bertambah menjadi 5 dengan penambahan di setiap PLBN yaitu Aruk, badau, Jagoi Babang dan Sungai Kelik
- 3) Diharapkan pada tahun 2030, seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dapat terhubung melalui lintas Timur, lintas Barat, Lintas Utara, lintas Selatan, dan lintas Tengah. Meningkatnya kualitas jalan di Kalimantan Barat.
- 4) Diharapkan pada tahun 2030, seluruh Kabupaten/kota di Kalimantan Barat terdapat prasarana transportasi darat yaitu terminal tipe B yang melayani Angkutan AKDP
- 5) Meningkatnya jumlah panjang, kualitas dan kapasitas jalan Nasional dan Jalan Provinsi agar bisa dilalui kendaraan dengan muatan berat dari pusat – pusat kegiatan wilayah yang tersebar di Kalimantan Barat
- 6) Terbukanya daerah yang memiliki potensi ekonomi seperti pembukaan lokasi penambangan agar menjadi daya tarik ekonomi dan menjadi prioritas pembangunan prasarana jalan serta membuka keterisolasian daerah tersebut.

c. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

- 1) Meningkatnya jaringan prasarana penyeberangan antar Kalimantan Barat dengan Pulau Sumatera ada sebanyak 2 unit yaitu 1 unit di Ketapang , dan 1 unit di Sintete Sambas
- 2) Meningkatnya Kapasitas Dermaga Penyeberangan yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten

- 3) Meningkatnya jumlah dan kapasitas Dermaga sungai dan danau di Kalimantan Barat
- 4) Tidak ada jaringan prasarana transportasi Penyeberangan yang melintasi/memotong Sungai di Kalimantan Barat karena pada masa yang akan datang direncanakan akan dibangun jembatan pada setiap perlintasan Sungai.

d. Transportasi Kereta Api

- 1) Terwujudnya Pengembangan Jaringan Rel kereta Api untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas IKN dan menghubungkan Provinsi di Pulau Kalimantan
- 2) Pengembangan jaringan prasarana kereta api diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah Pulau Kalimantan, khususnya untuk angkutan Batubara. Pengembangan tersebut diharapkan mampu untuk melayani potensi pengangkutan komoditas utama di Pulau Kalimantan yaitu batubara, minyak, perkebunan/hutan dan industri sampai ke pelabuhan terdekat atau untuk kebutuhan distribusi internal di Kalimantan Barat.

e. Transportasi Laut

- 1) Meningkatnya jumlah pergerakan penumpang luar negeri serta terwujudnya jumlah pelabuhan yang dapat melayani angkutan barang luar negeri
- 2) Meningkatkan operasional dan fungsi Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan utama menjadi Pelabuhan HUB Internasional dengan adanya Pengembangan Terminal Kijing yang mempunyai dermaga dengan kedalaman -16.00 LWS yang dapat melayani sandar Kapal Mother Vessel 100.000 DWT
- 3) Untuk jangka menengah dan jangka panjang masih terdapat 4 pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Padang tikar, Mempawah, Tanjung Satai dan Sukadana , namun perlu ditingkatkan kapasitas dan produktivitas pelabuhan.

f. Transportasi Udara

- 1) Peningkatan kapasitas fasilitas Bandar udara untuk mendukung permintaan jasa angkutan udara
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan PKP-PK yang sesuai dengan standar.
- 3) Tersedianya prakiraan kebutuhan jenis dan jumlah pesawat udara untuk melayani semua rute penerbangan Internasional dan Domestik
- 4) Tersedianya data dan informasi angkutan udara secara akurat

I.3. 1. Permasalahan

1.4.1.1 Transportasi Antarmoda/Multimoda

a) Transportasi Antarmoda/Multimoda

- 1) Kurangnya keterpaduan pelayanan di wilayah perbatasan dengan Negara tetangga di Kalimantan Barat dengan membangun akses jaringan jalan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal kereta api.
- 2) Belum adanya pelabuhan hub internasional yang dapat mewujudkan *one stop services* pada angkutan barang.
- 3) Kurangnya keterpaduan jadwal pelayanan penumpang di simpul-simpul nasional udara, laut, dan penyeberangan dengan jadwal pelayanan angkutan lanjutan
- 4) Kurangnya keterpaduan jaringan pelayanan transportasi multimoda untuk angkutan barang melalui pengangkutan laut/perairan pada pelabuhan utama antar pulau dengan pengangkutan darat massal.
- 5) Kurang optimalnya ketersediaan angkutan pemadu moda di ibu Kota provinsi Kalimantan Barat

b) Permasalahan Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Masih kurangnya Sarana Fasilitas Keselamatan Jalan yang menyebabkan tingginya Tingkat terjadi kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. Masih seringnya Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Pengguna lalu Lintas Jalan yang tidak mematuhi Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan.

3. Masih Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang tersedia di Terminal Type B sehingga belum terlaksananya pelayanan angkutan di terminal Type B yang berdasarkan SPM.
4. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan. Hal ini tidak terlepas dari kurang optimalnya aspek pengendalian dan standar yang ditetapkan. Kondisi ini juga diperparah dengan standar tarif angkutan umum yang rendah dan tidak ada subsidi pemerintah, sehingga pihak pengusaha angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang rendah.
5. Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memberikan pelayanan menyebabkan kendaraan pribadi masih sangat dominan.
6. Jumlah armada angkutan perkotaan yang tersedia tidak memadai.
7. Belum terintegrasinya angkutan antar dan inter moda yang baik.
8. Masih tingginya Tingkat pelanggaran lalu Lintas yang menyebabkan kecelakaan lintas di jalan.
9. Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap muatan lebih angkutan barang “ Over Loading Over Dimensi” (ODOL) yang menyebabkan tingginya kerusakan jalan dan menyebabkan tingginya Tingkat kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.
10. Belum adanya penindakan pelanggaran pengguna angkutan jalan yang melanggar Over Loading Over Dimensi” (ODOL) yang tegas.
11. Belum adanya pengawasan yang rutin dalam penanganan Over Loading Over Dimensi” (ODOL) di Kalimantan Barat.
12. Kurang Optimalnya pelayanan Angkutan ALBN karena belum adanya Updating SOP Angkutan LBN melalui Sosek Malindo
13. Kurang optimalnya pelayanan Angkutan AKAP
14. Belum Adanya SOP Angkutan Barang LBN yang terintegrasi dengan Sarawak Malaysia
15. Belum adanya angkutan umum massal yang memadai khususnya di Ibukota Kalimantan Barat yaitu di Pontianak dan sekitarnya
16. Tidak tersedianya pelayanan angkutan massal sebagai Feeder Terminal

17. Kapasitas Jalan akses yang mendukung Simpul-simpul nasional (pelabuhan dan terminal barang) di Kalimantan Barat masih rendah ,kelas III

c) Transportasi ASDP

1. Masih Kurangnya Pelayan Taryek lintasan Angkutan Sungai sehingga belum terciptanya Konektifitas yang maksimal.
2. Masih belum Tersentralisasi tempat Bongkar Muat kapal Angkutan Barang dan Angkutan Orang.
3. Masih Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang tersedia di Pelabuhan Sungai sehingga belum terlaksananya pelayanan Angkutan Sungai yang berdasarkan SPM.
4. Masih kurangnya Fasilitas Keselamatan Angkutan Sungai. Belum efektif dan efisiennya manajemen Pelabuhan Dwikora, sehingga kepadatan angkutan barang menjadi tinggi dikarenakan keterbatasan peralatan penunjang pelabuhan.
5. Pelabuhan Terminal Induk KM 9,2 Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat belum berfungsi secara efektif dan maksimal dikarenakan dalam kondisi rusak berat, diperlukan untuk perbaikan mengingat masih difungsikan sampai sekarang.
6. Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan kurangnya peralatan dan pemeliharaan kapal khususnya kapal-kapal rakyat.
7. Masih terbatasnya pelayanan ke Wilayah Kepulauan, terutama karena keterbatasan prasarana dan sarana, tingginya biaya operasional dan jumlah penumpang yang terbatas.
8. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan.
9. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi.
10. Masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keamanan penumpang.
11. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan.

12. Masih perlunya subsidi untuk memberikan pelayanan angkutan sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
13. Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan Pelabuhan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, masih belum dilaksanakan karena saat ini pelabuhan regional masih menjadi kewenangan Departemen Perhubungan.
14. Jaringan pelayanan transportasi penyeberangan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi penumpang, barang dan kendaraan bermotor.
15. Tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi penyeberangan dengan moda lain (antar moda) masih rendah, sehingga pelayanan dari pintu ke pintu (*door to door services*) belum dapat terwujud.

d) Transportasi Laut

1. Tinggungnya Tingkat kunjungan kapal ke Pelabuhan Dwikoran sehingga perlunya Pengaturan waktu kapal yang masuk dan keluar di Pelabuhan Pontianak untuk penumpukan kapal yang menunggu di muara, dan keluar masuk kapal lebih teratur.
2. Pengaturan waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Pontianak agar kapal yang masuk dan keluar lebih meningkat.
3. Masih kurangnya Fasilitas Bongkar muat sehingga perlunya menambah fasilitas bongkar muat untuk mengurangi waktu sandar kapal di Pelabuhan Pontianak dan akan meningkatkan jumlah kapal yang akan masuk.
4. Pendangkalan jalur keluar masuk kapal dari muara menuju Pelabuhan Pontianak yang perlu dilakukan Pengerukan alur sungai Kapuas.
5. Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan Pelabuhan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, masih belum dilaksanakan karena saat ini pelabuhan regional masih menjadi kewenangan Departemen Perhubungan.

6. Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan kurangnya peralatan dan pemeliharaan kapal khususnya kapal-kapal rakyat.
7. Trayek antar negara masih didominasi oleh pelayaran asing.
8. Pelayanan angkutan barang saat ini belum banyak dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional sehingga aksesibilitas pelayanan oleh armada nasional belum memadai.
9. Kurangnya armada nasional yang melayani penumpang antar negara.
10. Kurangnya frekuensi dan jumlah kapal yang melayani pergerakan penumpang antar pulau.
11. Kurangnya frekuensi dan jumlah kapal barang yang melayani pergerakan antar pulau.
12. Masih kurangnya frekuensi pelayanan kapal yang melayani pergerakan penumpang.
13. Masih kurangnya armada nasional untuk angkutan laut dalam negeri
14. Waktu kedatangan kapal masih belum tepat waktu disebabkan banyak faktor seperti diantaranya faktor cuaca, lama pelayanan pandi di pelabuhan.
15. Kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu kerja pelayanan kapal di pelabuhan.
16. Kurangnya frekuensi dan jumlah kapal penumpang dan barang yang melayani Pulau Kalimantan.
17. Rendahnya ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang dan barang.
18. Kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu kerja pelayanan kapal penumpang dan barang di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Kalimantan.

1. Transportasi Udara

- 1) Perlu biaya yang besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara domestik menjadi bandar udara internasional.
- 2) Masalah administrasi dalam hal pengiriman barang, bagasi dan pos keluar negeri yang memerlukan waktu.

- 3) Kedatangan dan keberangkatan pesawat biasanya terkendala teknis maupun non teknis yang seharusnya diperhitungkan.
- 4) Administrasi pengiriman barang membutuhkan waktu sehari-hari.
- 5) Terkendala sarana dan prasarana yang belum memadai ditinjau dari tingkat keamanan maupun kapasitas yang tersedia.
- 6) Frekuensi pelayanan penumpang rendah.
- 7) Angkutan barang masih didominasi oleh angkutan jalan dan Angkutan sungai

I.3.1. Kinerja Prasarana Transportasi

a. Transportasi Jalan

- 1) Belum Optimalnya Operasional Terminal tipe A di Sungai Ambawang
- 2) Belum Operasinya Terminal Barang Internasional (TBI) di Entikong
- 3) Pelayanan Terminal Tipe B di Klimantan Barat masih dibawah Standar pelayanan minimal (SPM) Terminal tipe B
- 4) Masih ada Terminal Tipe B yang melayani treyek AKDP dikelola oleh Pmeerintah Kabupaten/kota dan belum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- 5) Masih adanya terminal bayangan yang beroperasi di tepi jalan
- 6) Kapasitas Jalan akses khususnya jaringan jalan yang mendukung Simpul-simpul nasional (pelabuhan dan terminal barang) di Kalimantan Barat masih rendah , kelas III
- 7) Kondisi geografi yang berupa tanah gambut serta hutan yang masih sangat lebat. Demand pembangunan infrastruktur yang kurang.
- 8) Kondisi prasarana jalan yang sering rusak akibat dilintasi oleh kendaraan berat angkutan tambang dan perkebunan yang overloading

b. Transportasi Sungai dan Penyeberangan

- 1) Penambahan kapal dan pembangunan dermaga penyeberangan masih belum optimal, sehingga konsep jaringan sabuk masih banyak yang belum terhubung.
- 2) Tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi penyeberangan dengan moda lain (antar moda) masih rendah, sehingga pelayanan dari pintu ke pintu (*door to door services*) belum dapat terwujud
- 3) Masih Belum optimalnya kapasitas dermaga Sungai sebagai tempat bongkar muat Angkutan Sungai

c. Transportasi Laut

- 1) Belum maksimalnya operasional terminal Kijing sebagai pengembangan Pelabuhan Pontianak
- 2) Kapasitas dan produktivitas pelabuhan pengumpan Nasional dan pengumpan regional masih rendah
- 3) Pelabuhan Laut Regional belum diserahkan kepada pemerintah provinsi

d. Transportasi Udara

- 1) Perlu biaya yang besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara domestik menjadi bandar udara internasional.
- 2) Sebagian besar bandar udara di wilayah Kalimantan Barat masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan jasa pelayanan angkutan udara.
- 3) Belum tersedianya fasilitas bandar udara di beberapa wilayah pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat

I.4. PELUANG DAN TANTANGAN

1. Peluang

Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan dan penyelenggaraan transportasi di masa yang akan datang antara lain:

- a. Makin luasnya jalinan kerja sama antara perusahaan transportasi nasional dengan perusahaan asing bertaraf internasional dalam

rangka melayani permintaan transportasi dari dan ke Indonesia Khususnya daerah Kalimantan Barat

- b. Kerja sama bilateral dan multilateral yang semakin baik dan dinamis dapat meningkatkan investasi dan penguasaan Iptek.
- c. Kerja sama *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dalam bidang investasi dan perdagangan semakin berkembang pesat, serta forum kerja sama ekonomi sub-regional.
- d. Kerjasama BIMP-EAGA yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina khususnya kerjasama Ekonomi Kalimantan Bagian Barat atau West Borneo Economic Corridor (WBEC)
- e. Kerjasama Sosek Malindo Antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia dalam bidang kerjasama sama Ekonomi. Perdagangan dan Perhubungan
- f. Deregulasi di bidang ekonomi membuka peluang bagi dunia usaha untuk mengembangkan kegiatan dengan semangat persaingan. Deregulasi ini diharapkan dapat mendorong berlakunya mekanisme pasar dalam berbagai kegiatan transaksi ekonomi sehingga peran pemerintah dalam pengelolaan berbagai sarana dan prasarana transportasi dapat dikurangi.
- g. Meningkatnya kegiatan ekonomi sebagai hasil pembangunan, mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang dan barang, sehingga akan mendorong pertumbuhan sektor transportasi.
- h. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap jasa transportasi, akan lebih menjamin pengembalian biaya investasi, pemeliharaan dan operasi sarana dan prasarana transportasi.
- i. Kemajuan industri sarana dan prasarana transportasi dalam negeri, lebih memungkinkan peningkatan kapasitas pelayanan yang sesuai permintaan.
- j. Undang-undang otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaannya akan meningkatkan kegiatan nasional di

berbagai daerah, sehingga meningkatkan pergerakan barang dan orang.

- k. Reformasi kebijakan nasional di sektor ekonomi dan industri memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan, baik sebagai Penanaman Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
- l. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas yang makin baik.

2. Tantangan

Tantangan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi pada masa mendatang antara lain:

- a. Adanya hambatan kelembagaan, kurang mendukung perkembangan sistem transportasi antarmoda/multimoda.
- b. Penyerahan urusan bidang transportasi kepada daerah sesuai ketentuan memungkinkan timbulnya pengkotakan pelayanan transportasi jika tidak disertai dengan adanya kesamaan persepsi dan prioritas kepentingan.
- c. Wilayah Kalimantan Barat yang luas dan mempunyai Garis Perbatasan yang sangat panjang dengan Sarawak Malaysia memerlukan investasi besar dalam pembangunan transportasi.
- d. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia mengakibatkan investasi khususnya di bidang transportasi masih rendah.
- e. Terbatasnya kemampuan dalam penggunaan teknologi maju pada pelayanan transportasi karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang berkualitas.
- f. Pola kerja sama operasional di antara sesama perusahaan multinasional dalam bentuk aliansi strategis mengakibatkan kesempatan meraih muatan menjadi lebih sempit dan sulit.
- g. Manajemen pengelolaan kegiatan transportasi masih menghadapi kendala dalam bentuk terbatasnya SDM yang berkualitas dan profesional. Karena lemahnya manajemen pengelolaan ini, maka

kemampuan perusahaan untuk mengembangkan prasarana dan sarana transportasi menjadi terbatas.

- h. Makin meningkatnya kecenderungan pemakaian mobil pribadi dan sepeda Motor di kota besar karena kurang memadainya pelayanan angkutan umum dan pembangunan jalan tol.
- i. Kurangnya keterpaduan antar dan intramoda mengakibatkan pelayanan dari pintu-ke-pintu belum optimal dan tingginya biaya transportasi.
- j. Pengaturan di bidang transportasi belum sepenuhnya dapat menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Masih terdapat ketentuan yang tidak mendukung atau bertentangan dengan upaya pengembangan prasarana dan sarana transportasi di wilayah dan secara nasional.
- k. Kurang tersedianya sarana transportasi, khususnya untuk pelayanan transportasi udara yang sangat diperlukan untuk pelayanan daerah terpencil dengan intensitas permintaan yang kecil

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan semua kebijakan di atas, yaitu : visi, misi dan program Gubernur; RPJMD Provinsi Kalimantan Barat; serta draft Renstra Kementerian Perhubungan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Perlunya terciptanya konektivitas transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP)
2. Perlunya Peningkatan konektivitas transportasi Angkutan Jalan di Kalimantan Barat mengingat wilayah kalimantan barat sebagai Wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan jalur Transportasi Lintas Perbatasan Antar Negara.
3. Masih kurangnya Sarana Prasarana Pelayanan di Dermaga/Pelabuhan yang berdasarakan SPM.
4. Belum optimalnya fasilitas keselamatan SDP.
5. Belum optimalnya fasilitas keselamatan darat.
6. Belum optimalnya fasilitas serta kapasitas terminal dan pelabuhan.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat		Rasio konektivitas Provinsi					
		Meningkatnya pelayanan, konektivitas dan keselamatan angkutan jalan	Rasio konektivitas angkutan jalan					
		Meningkatnya pelayanan, konektivitas dan keselamatan angkutan sungai, danau dan penyebrangan	Rasio konektivitas angkutan sungai, danau dan penyebrangan					
		Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Darat	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	-	-	52%	67%	71%
		Meningkatnya kapasitas terminal penumpang	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum	-	-	90%	83%	72%
		Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP	-	-	98%	87%	79%

4.2 Cascading

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 - 2026

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KONDISI AWAL	TARGET				PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (ESS IV)	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET																		
			Satuan	2024	2025	2026				Satuan	2024	2025	2026				Satuan	2024	2025	2026				Satuan	2024	2025	2026															
Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	71%	%			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Ketersediaan sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	%					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersusunnya Laporan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ prov	dok/lepo ran				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	tersedianya Rencana Induk jaringan LLAJ Provinsi	jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ	dok																		
																													Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	tersedianya regulasi rencana induk jaringan jalan LLAJ prov	jumlah Regulasi Rencana Induk jaringan LLAJ Prov	dok										
																																				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya pengendalian rencana induk jaringan LLAJ Prov	jumlah rekomendasi pengendalian rencana induk Jaringan LLAJ	dok/lap			
																													Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	tersedianya perengkapan jalan di jalan provinsi	jumlah perengkapan jalan yang disediakan	paket		2	6							
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	terlaksananya rehab dan pemeliharaan prasarana jalan	jumlah prasarana jalan yang di rehab dan dipelihara	unit																																						
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	terlaksananya rehab dan pemeliharaan perengkapan jalan	jumlah perengkapan jalan yang di rehab dan dipelihara	paket			1																												
	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum	93%	%			90%	Meningkatnya kapasitas terminal penumpang								Persentase tingkat pelayanan penumpang yang tersedia mencapai 0,72	lokasi												Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	tersedianya dokumen rencana pembangunan terminal penumpang tipe B	jumlah dokumen rencana pembangunan terminal penumpang tipe-B	dok											
								Pembangunan Gedung Terminal	terlaksananya pembangunan gedung terminal	jumlah gedung terminal yang dibangun	unit																															
																																					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal yang dikembangkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dikembangkan	paket		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)								Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang direhabilitasi dan pemeliharaan				1																													
														Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B																							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah SDM Pengelola Terminal yang mengikuti Diklat	orang			
Penetapan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Jaringan Jalan Provinsi yang diat	ruas		1	2																																				
							Pengadaan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalulintas	Terlaksananya Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalulintas	Jumlah Perengkapan Jalan yang dipasang	ruas																																
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekeyasa Lalu Lintas	kali		3	3																																				
							Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Razia kendaraan angkutan barang	kali		14	14	14																												
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Koordinasi antar instansi terkait	kali																																							
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalan	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalan yang dikeluarkan	Jumlah Kebijakan tata kelola Andalan yang dikeluarkan	dok																																
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Penilai Andalan yang mengikuti workshop	Jumlah Penilai Andalan yang mengikuti workshop	org																																							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalan	kali			3																													
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalan	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalan	Jumlah pelaksanaan Andalan yang dimonitor	kali																																							
							Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ yang memiliki kapasitas	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang memiliki kapasitas	org																																
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dimonitor	unit		10	10								12																												

SASARAN OPD	INDUKUR SASARAN OPD	KONDISI AWAL	PROGRAM				SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	Sasaran	2024	2025	2026	KEGIATAN	KEGIATAN (ESS IV)	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Satuan	2024	2025	2026		
			Satuan	2024	2025	2026										Satuan	2024	2025	2026							Satuan	2024
																	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	kali	4	4	4				
																	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	org	-	-	-				
																	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	kali	-	-	-				
																	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	trayek	9	9	12				
																	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	kali	3	3	5				
																	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	Dok	-	-	-				
																	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Dok	-	-	-				
																	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dok	-	-	-				
																	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perijinan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dok	-	-	-				
																	Penetapan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	kali	-	-	-				
																	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	kali	-	-	-				
																	Penetapan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan	kali	-	-	-				
																	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dok	-	-	-				
																	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	kali	-	-	6				

SASARAN OPD	INDUKATOR SASARAN OPD	BUNYI AWAL					PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM					KEGIATAN	KEGIATAN (ESS IV)	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN				SASARAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR SUB KEGIATAN										
			Satuan	2024	2025	2026				Satuan	2024	2025	2026				Satuan	2024	2025	2026	Satuan	2024	2025	2026	Satuan	2024	2025	2026							
													Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlayannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan Perencanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dok	-	-	-		Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dok	-	-	-		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	kali	-	-	7
													Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotakan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya dokumen penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotakan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotakan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dok	-	-	-		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	dok	-	-	-		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	dok	-	-	-
													Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	kali	2	2	2																
	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP	99%	%			98%	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan di Sungai Darau dan Penyeberangan (SDP)	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP	a	-	-	2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			dok	-	-	2	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dok	-	-	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	kali	-	-	6	
													Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			dok	-	-	3	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dok	-	-	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	kali	-	-	6		

SASARAN OPD	INDUKSI OK SASARAN OPD	RUNDISI AWAL	PROGRAM				SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM				KEGIATAN	KEGIATAN (ESS IV)	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN			
			Satuan	2024	2025	2026		Satuan	2024	2025	2026				Satuan	2024	2025	2026			Satuan	2024	2025	2026
												Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Berangkutan		dok	8	6	10	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dok	8	6	10
																	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	kali	4	4	4	
												Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi					Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	trayek	1	1	1	
																	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	trayek	1	1	1	
																	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	kali	4	4	4	
																	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	dok	2	3	3	
																	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dok	2	3	3	
																	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait					

SASARAN OPD	INDUKSI OK SASARAN OPD	RUNDISI AWAL	PROGRAM				SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM				KEGIATAN	KEGIATAN (ESS IV)	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN			
			Satuan	2024	2025	2026		Satuan	2024	2025	2026				Satuan	2024	2025	2026			Satuan	2024	2025	2026
																	Analisis Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota			dok	-	1	-	
																	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota			data	-	1	1	
																	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota				-	1	1	
																	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	kapal	-	-	6	

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang berkualitas, terpadu, memadai bagi pengguna jasa perhubungan melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi.	1. Meningkatnya Pelayanan Konektivitas dan keselamatan angkutan jalan	Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan sapsras Angkutan jalan Yang yang memadai	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Jalan
	2. Meningkatnya pelayanan konektivitas dan keselamatan angkutan sungai danau dan penyeberangan	Meningkatkan sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi ASDP

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	28.513.937.300,00	A Nilai	17.093.393.300,00	A Nilai	16.557.746.300,00	-	62.165.076.900,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0,00	BB Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00		
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan / Dokumen	7 Laporan / Dokumen	891.443.300,00	7 Laporan / Dokumen	891.443.300,00	7 Laporan / Dokumen	911.443.300,00	21 Laporan / Dokumen	2.694.329.900,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	306.443.300,00	3 Dokumen	306.443.300,00	3 Dokumen	306.443.300,00	9 Dokumen	919.329.900,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	3 Dokumen	135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	170.000.000,00	5 Laporan	170.000.000,00	5 Laporan	170.000.000,00	15 Laporan	510.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	4 Laporan	250.000.000,00	4 Laporan	270.000.000,00	12 Laporan	770.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.790.000.000,00	100 %	10.890.500.000,00	100 %	10.895.610.000,00	300 %	32.576.110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	81 Orang/Bulan	10.300.000.000,00	84 Orang/Bulan	10.400.000.000,00	84 Orang/Bulan	10.400.000.000,00	249 Orang/Bulan	31.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00	1 Dokumen	255.500.000,00	1 Dokumen	260.610.000,00	3 Dokumen	771.110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	1 Dokumen	22.000.000,00	1 Dokumen	22.000.000,00	3 Dokumen	66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	3 Laporan	66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	1 Dokumen	27.000.000,00	1 Dokumen	27.000.000,00	3 Dokumen	81.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	76.000.000,00	4 Laporan	76.000.000,00	4 Laporan	76.000.000,00	12 Laporan	228.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	38.000.000,00	2 Dokumen	38.000.000,00	2 Dokumen	38.000.000,00	6 Dokumen	114.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 Laporan / Dokumen	100 Laporan / Dokumen	221.000.000,00	100 Laporan / Dokumen	221.000.000,00	100 Laporan / Dokumen	221.000.000,00	300 Laporan / Dokumen	663.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	2 Laporan	40.000.000,00	2 Laporan	40.000.000,00	6 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	2 Laporan	40.000.000,00	2 Laporan	40.000.000,00	6 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	76.000.000,00	4 Laporan	76.000.000,00	4 Laporan	76.000.000,00	12 Laporan	228.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		0,00	-	35.894.000,00	-	41.800.000,00	-	47.000.000,00	-	124.694.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	17.153.300,00	1 Dokumen	20.200.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	62.353.300,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT

2.15.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	18.740.700,00	1 Dokumen	21.600.000,00	1 Dokumen	22.000.000,00	1 Dokumen	62.340.700,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	633.000.000,00	100 %	639.000.000,00	100 %	639.000.000,00	300 %	1.911.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	150.000.000,00	15 Unit	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	2 Paket	175.000.000,00	2 Paket	181.000.000,00	2 Paket	181.000.000,00	6 Paket	537.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	58.000.000,00	1 Dokumen	58.000.000,00	1 Dokumen	58.000.000,00	3 Dokumen	174.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13 Orang	200.000.000,00	13 Orang	200.000.000,00	13 Orang	200.000.000,00	39 Orang	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	150 Orang	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.132.000.000,00	100 %	1.135.000.000,00	100 %	1.188.000.000,00	300 %	3.455.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	3 Paket	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	1 Paket	250.000.000,00	1 Paket	250.000.000,00	3 Paket	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	3 Paket	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	1 Paket	110.000.000,00	1 Paket	110.000.000,00	3 Paket	330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	66.000.000,00	2 Paket	67.000.000,00	1 Paket	68.000.000,00	4 Paket	201.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	3 Dokumen	36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	3 Paket	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	3 Laporan	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	1 Dokumen	42.000.000,00	1 Dokumen	43.000.000,00	3 Dokumen	126.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	1 Dokumen	29.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	87.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	100 %	12.350.000.000,00	100 %	800.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	13.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	1 Unit	12.200.000.000,00	2 Unit	700.000.000,00	-	0,00	3 Unit	12.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,00	10 Paket	50.000.000,00	10 Paket	50.000.000,00	10 Paket	50.000.000,00	10 Paket	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0,00	10 Unit	100.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	25 Unit	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.000.600.000,00	100 %	2.003.650.000,00	100 %	2.023.693.000,00	300 %	6.027.943.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	1 Laporan	650.000,00	1 Laporan	663.000,00	3 Laporan	1.913.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	1 Laporan	502.000.000,00	1 Laporan	507.020.000,00	3 Laporan	1.509.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1 Laporan	1.501.000.000,00	1 Laporan	1.516.010.000,00	3 Laporan	4.517.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	460.000.000,00	100 %	471.000.000,00	100 %	482.000.000,00	300 %	1.413.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	205.000.000,00	1 Unit	206.000.000,00	1 Unit	207.000.000,00	3 Unit	618.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	55.000.000,00	50 Unit	55.000.000,00	50 Unit	55.000.000,00	150 Unit	165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	110.000.000,00	1 Unit	120.000.000,00	3 Unit	330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	6 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Layanan Jaringan Transportasi Jalan	73 %	77,5 %	25.585.000.000,00	81,5 %	10.996.000.000,00	85,5 %	11.552.102.500,00	-	48.133.102.500,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pada Simpul Jaringan Transportasi Jalan	71 %	76 %	0,00	81 %	0,00	86 %	0,00	86 %	0,00		
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen/Laporan Sosialisasi / Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Prov Kalbar	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	300 %	570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	1 Laporan	90.000.000,00	1 Laporan	90.000.000,00	3 Laporan	270.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Presentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	100 %	100 %	1.280.000.000,00	100 %	1.660.000.000,00	100 %	2.130.000.000,00	300 %	5.070.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	400.000.000,00	3 Unit	600.000.000,00	4 Unit	800.000.000,00	9 Unit	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	12 Unit	350 Unit	630.000.000,00	450 Unit	810.000.000,00	600 Unit	1.080.000.000,00	1.400 Unit	2.520.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	0,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	3 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00	3 Unit	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Type B	100 %	100 %	20.900.000.000,00	100 %	5.900.000.000,00	100 %	5.900.000.000,00	300 %	32.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	20.000.000.000,00	1 Unit	5.000.000.000,00	1 Unit	5.000.000.000,00	3 Unit	30.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1 Unit	4 Unit	400.000.000,00	4 Unit	400.000.000,00	4 Unit	400.000.000,00	12 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	4 Unit	400.000.000,00	4 Unit	400.000.000,00	4 Unit	400.000.000,00	12 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	100 %	100 %	990.000.000,00	100 %	1.040.000.000,00	100 %	1.090.000.000,00	300 %	3.120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	210.000.000,00	3 Laporan	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	0,00	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	170.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	3 Unit	520.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	0,00	2 Dokumen	450.000.000,00	2 Dokumen	450.000.000,00	2 Dokumen	450.000.000,00	6 Dokumen	1.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	1 Laporan	130.000.000,00	3 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	3 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Presentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	100 %	100 %	170.000.000,00	100 %	180.000.000,00	100 %	195.000.000,00	300 %	545.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	3 Laporan	360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	3 Laporan	185.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Jumlah Dokumen/ Laporan Audit Keselamatan Jalan Di Jalan Provinsi	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	310.000.000,00	100 %	320.000.000,00	300 %	930.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00	8 Laporan	160.000.000,00	8 Laporan	170.000.000,00	24 Laporan	480.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	3 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Jumlah Angkutan Umum yang laik Pakai dan Trayek yang Tersedia	100 %	100 %	760.000.000,00	100 %	770.000.000,00	100 %	780.000.000,00	300 %	2.310.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit	2 Unit	600.000.000,00	2 Unit	600.000.000,00	2 Unit	600.000.000,00	6 Unit	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	1 Laporan	170.000.000,00	1 Laporan	180.000.000,00	3 Laporan	510.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan	0,00	100 %	175.000.000,00	100 %	175.000.000,00	100 %	175.000.000,00	300 %	525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	3 Dokumen	225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan	0,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	300 %	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan	0,00	100 %	175.000.000,00	100 %	125.000.000,00	100 %	125.000.000,00	300 %	425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.11.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.11.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	0,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	3 Dokumen	225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

	Pedesaan Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi												
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan	0,00	100 %	175.000.000,00	100 %	175.000.000,00	100 %	175.000.000,00	300 %	525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
2.15.02.1.12.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA	
2.15.02.1.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	3 Dokumen	225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	Presentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan	0,00	100 %	170.000.000,00	100 %	170.500.000,00	100 %	171.102.500,00	300 %	511.602.500,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT		

	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											AN BARAT	
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	4 Unit	8 Unit	120.000.000,00	8 Unit	120.500.000,00	8 Unit	121.102.500,00	24 Unit	361.602.500,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan	0,00	100 %	140.000.000,00	100 %	140.500.000,00	100 %	141.000.000,00	300 %	421.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.02.1.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan	2 Unit	4 Unit	90.000.000,00	4 Unit	90.500.000,00	4 Unit	91.000.000,00	12 Unit	271.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

	yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan												
2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	0,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA	
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan	0,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	300 %	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
2.15.02.1.15.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Layanan Jaiangan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan	36 %	71 %	1.624.500.000,00	89 %	1.376.250.000,00	100 %	2.015.375.000,00	100 %	5.016.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT		

		Penyeberangan										AN BARAT	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Presentase Layanan Jaringan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	100 %	100 %	40.000.000,00	100 %	57.000.000,00	100 %	72.000.000,00	300 %	169.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	4 Unit	22.000.000,00	6 Unit	32.000.000,00	6 Unit	69.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas	Presentase Layanan Jaringan Transportasi Angkutan Laut	100 %	100 %	38.000.000,00	100 %	58.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	171.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

	Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional												
2.15.03.1.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	3 Unit	22.000.000,00	5 Unit	33.000.000,00	7 Unit	40.000.000,00	15 Unit	95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	3 Laporan	76.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Presentase Layanan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	100 %	100 %	64.000.000,00	100 %	97.000.000,00	100 %	145.000.000,00	100 %	306.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

2.15.03.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	1 Unit	21.000.000,00	1 Unit	32.000.000,00	1 Unit	47.000.000,00	3 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	43.000.000,00	1 Laporan	65.000.000,00	1 Laporan	98.000.000,00	3 Laporan	206.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Presentase Layanan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	100 %	100 %	12.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	27.000.000,00	300 %	57.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

2.15.03.1.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	27.000.000,00	3 Dokumen	57.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	100 %	100 %	60.000.000,00	100 %	140.000.000,00	100 %	109.000.000,00	300 %	309.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.15.03.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	49.000.000,00	3 Laporan	119.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA

	Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi												
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Presentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Bongkar Muat Barang	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	95.000.000,00	100 %	125.000.000,00	300 %	290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00	12 Dokumen	55.000.000,00	15 Dokumen	65.000.000,00	37 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA	

	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	60.000.000,00	3 Laporan	130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam daerah Provinsi	0,00	100 %	55.000.000,00	100 %	133.000.000,00	100 %	70.000.000,00	300 %	258.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

2.15.03.1.07.01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	-	0,00	1 Dokumen	60.000.000,00	-	0,00	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.07.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	-	0,00	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	53.000.000,00	1 Laporan	70.000.000,00	3 Laporan	158.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintasan	100 %	100 %	1.285.500.000,00	100 %	778.250.000,00	100 %	1.392.375.000,00	300 %	3.456.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

2.15.03.1. 10.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	0,00	1 Unit	250.000.000,00	-	0,00	3 Unit	750.000.000,00	4 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1. 10.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Unit	3 Unit	950.000.000,00	4 Unit	650.000.000,00	1 Unit	450.000.000,00	8 Unit	2.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
2.15.03.1. 10.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	85.500.000,00	1 Laporan	128.250.000,00	1 Laporan	192.375.000,00	3 Laporan	406.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
					55.723.437.300,00		29.465.643.300,00		30.125.223.800,00		115.314.304.400,00		

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 IKU dan IKK Tahun 2024-2026

Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat pada akhir periode. Hal ini di lihat dari akumulasi pencapaian indikator out come program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Hal ini juga di tunjukan dengan adanya target yang telah di tetapkan setiap tahun sebagai kunci mengukur tingkar keberhasilan capaian kinerja.

Penyusunan indikator kinerja ini, didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Barat Tahun 2005-2025 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada tahun 2020. Penyusunan indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026

No	PROGRAM	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target 2023	Target			Keterangan	KETERANGAN
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,23					Jumlah Trayek yang dilayani pada Provinsi X Bobot trayek	BIDANG ANGKUTAN JALAN
							Jumlah Kebutuhab Trayek Pada Provinsi		
		Prosentase Layanan Jaringan Transportasi Jalan	-	73%	77,5 %	81,5 %	85,5 %	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi darat x100%	BIDANG LALU LINTAS JALAN & BIDANG ANGKUTAN JALAN
							Persentase Layanan Transportasi Angkutan Jalan		
Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pada Simpul Jaringan Transportasi Jalan	-	71%	76%	81%	86%	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B x100%	BIDANG ANGKUTAN JALAN		
					Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B sesuai SPM				
		Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan			52%	67%	71%		BIDANG LALU LINTAS JALAN

	Transportasi Darat								
	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum			90%	83%	72%			BIDANG ANGKUTAN JALAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	0,60						Jumlah Lintasan Penyebrangan Yang Beroperasi X Bobot Lintas	BIDANG PELAYARAN
									Jumlah Kebutuhan Lintas Penyerangan ASDP pada Provinsi	
		Prosentase Layanan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	36%	71%	89%	100%		Jumlah Lintasan ASDP yang Terpenuhi x100%	
									Jumlah Kebutuhan Lintasan ASDP	
		Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pada Simpul Jaringan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	21%	38%	54%	67%		Jumlah fasilitas Pelabuhan Sungai Yang Tersedia X 100%	
								Jumlah Fasilitas Pelabuhan Sungai Yang Sesuai SPM		
		Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP			98%	87%	79%			

Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Darat	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat			52%	67%	71%
Meningkatnya kapasitas terminal penumpang	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum			90%	83%	72%
Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP(PINDAHAN Tabel 4.1)			98%	87%	79%

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, termasuk juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legitimet, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk juga Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, harus selalu siap dan berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya Good Governance tersebut dengan mengembangkan dan menerapkan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang diawali dengan disusunnya rencana kinerja untuk masa lima tahun dan rencana kinerja untuk setiap tahun dan selanjutnya fase-fase berikutnya mencakup pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja dan pelaporan atas pencapaian kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan LAKIP bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa penyusunan rencana strategik merupakan fase awal sistem AKIP yang paling penting. Rencana strategik akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

Sungai Raya, Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Barat,

Y. ANTONIUS RAWING, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 199403 1 005

LAMPIRAN

